

**KONSEP WELFARE STATE MAHATMA GANDHI SEBAGAI
IDEOLOGI ALTERNATIF UNTUK MENAHAN
NEO-LIBERALISME
(STUDI KASUS NEGARA INDIA)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Strata I pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

RAZLI ACHMAD PURBA

20070510090

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2012**

**MAHATMA GANDHI'S WELFARE STATE CONCEPT AS AN
ALTERNATIVE IDEOLOGY TO PREVENT NEO -
LIBERALISM
(CASE STUDY: INDIA)**



By :

RAZLI ACHMAD PURBA
20070510090

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI KONSEP WELFARE STATE MAHATMA GANDHI
SEBAGAI IDEOLOGI ALTERNATIF UNTUK MENAHAN
NEO-LIBERALISME
(STUDI KASUS NEGARA INDIA)

RAZLI ACHMAD PURBA
20070510090

Telah Dipertahankan, Dinyatakan Lulus dan Disahkan Dihadapan
Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada
Hari/tanggal : Selasa 20 Desember 2011
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Dosen (H.I.A)

TIM PENGUJI

Drs. Bambang Sunaryono, M.Si
Dosen Pembimbing/Ketua Penguji

Bambang Wahyu Nugroho, S.IP., M.A.
Dosen Penguji I

Takdir Ali Mukti, S.Sos, M.Si.
Dosen Penguji II

HALAMAN MOTTO

Dan seumpama semua pohon yang ada di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta dan ditambah lagi tujuh laut menjadi tinta tidak akan cukup menulis ilmu Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mulia dan Maha Bijaksana (Surat Al Luqman ayat 27)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Qs. Ar-ra'ad: 11)

Jangan kamu takut berbuat suatu kesalahan dalam melakukan sesuatu yang baik. Karena kebenaran akan lahir dari kesalahan - kesalahan yang kamu perbuat. (Razli Achmad Purba)

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others (Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena dengan ridhonya lah skripsi **“Konsep Welfare State Mahatma Gandhi Sebagai Ideologi Alternatif Menahan Neo - Liberalisme”** dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak mendapat bantuan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Bambang Sunaryono, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan pada penulis.
2. Bapak Bambang Wahyu Nugroho, S.IP.,M.A. selaku dosen penguji I yang telah bersedia menguji penulis.
3. Bapak Takdir Ali Mukti, S.Sos, M,Si. selaku dosen penguji II yang telah bersedia menguji penulis.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Pada akhirnya Allah Swt lah yang memberikan ridhonya atas penyelesaian skripsi ini dan semoga dapat menjadi ilmu pengetahuan bagin siapa saja yang membaca.

Senin, 2 Januari 2012

Razli Achmad Purba

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima Kasih Kepada:

- Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah, skripsi ini dapat selesai dan memberikan banyak pelajaran hidup yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Tentunya saya tidak akan berdaya tanpa pertolonganmu ya Rabb. Sujud syukurku, Alhamdulillah.
- Kedua orang tuaku, ayahku Abdul Razak Purba, emakku Lili Marlina Hasibuan, kakakku Fika Yuliza Purba, adikku Zaim Azroui Purba, dan seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungannya. Terutama mamak yang selalu menjadi penyemangat hidupku. Merci emaaakk.
- Maharani Dwi Sepriani yang selalu tanpa ampun mendukung saya dan setia menemani saya. Saya juga tidak tahu harus berkata apa.. Terima kasih banyak ya dek!
- Saudara-saudaraku, Rizal Khadafi Nst, Achmad Syai Lubis, Addinul Huda Lbs, Barahim Nst, Misdar Alamsyah, Bang Amir, Heri Marpaung, Leonandus Karo-Karo, Lias Bangun, Dedi Syahputra, Arsalan Nst, Arma Meika Hrp, Resti Icha, Hasian Sori Srg, lib Nst. Terima kasih semuanya.
- Sahabat-sahabat saya, Akbar Kausar, Ferdiansyah, Ovie Tristan, Pikri Arif, Taufik tinggi dan kecil, Abduh, Jehan, Zianussi, Ulan, Deni 1 dan 2, Tri Kodong, Intan Ornella, dan yang lain yang tak mungkin saya sebut satu per satu, terima kasih banyak atas dukungannya.

- *Keluarga besar kost Pandawa Kost, Budi Dadang, Mas Kambo, Mas Prince, Kipli, Edo, Ivan, Elfan, Indra, Inad, Raffi, Leo, Fariz, Iir, Tigor, Niko, Iqbal, Fajar, Anda, mas didik, dan tentunya Bu Ismuryanti dan Bapak Johan, dll. Terima kasih banyak semuanya..*
- *Dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan, dan sangat berjasa dan berpengaruh dalam kelulusan saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya!*

ABSTRAK

Judul skripsi “Konsep Welfare State Mahatma Gandhi Sebagai Ideologi Alternatif Menahan Neo-Liberalisme (Studi Kasus Negara India)” ini ditulis dengan harapan mencoba mencari sebuah alternatif solusi untuk menahan laju Neo-Liberalisme yang di dalam era Globalisasi ini pada kenyataannya tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Justru sebaliknya malah semakin memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mengambil sumber-sumber dari literatur, buku, jurnal, dan juga internet. Yang menjadi permasalahan disini adalah Globalisasi, bersama dengan Neo-Liberalisme yang digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, ternyata tidak mampu untuk mewujudkan janjinya itu. Sistem perekonomian pasar bebas yang diusung ternyata hanya menguntungkan bagi sebagian individu/organisasi. Kenyataan ini didasarkan pada fakta bertambah mencoloknya peranan segelintir individu /organisasi yang dapat memaksa negara-negara berkembang tunduk terhadap sistem ekonomi politik Neo-Liberal yang menjadi sistem era Global ini.

India sebagai negara berkembang, juga tidak luput dari serangan-serangan Neo-Liberal ini. Mulai dari bantuan hutang luar negeri, penyesuaian tarif internasional, pemaksaan ekspor bahan pangan, sampai dengan investasi-investasi jangka panjang, kerap menghiasi usaha Neo-Liberal untuk mampu mengontrol negara ini. Beruntungnya Mahatma Gandhi adalah orang India. Sebagai orang yang mempunyai pengaruh, Gandhi meninggalkan ideologi Negara Kesejahteraan ala dirinya dalam tiap-tiap manusia di India yang pada akhirnya mampu menjadi landasan dasar bagi para elite untuk mengambil kebijakan yang pas untuk rakyatnya. Landasan moral yang dipadukan oleh materi yang diusung Gandhi dalam penerapan Negara Kesejahteraan yang ia kemukakan, telah mampu membuktikan bahwa Neo-Liberalisme bisa dibendung di India.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL (INGGRIS).....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan pemilihan judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	22
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Jangkauan Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PERBANDINGAN ANTARA WELFARE STATE GANDHI DENGAN WELFARE STATE KONTEMPORER DALAM MENAHAN NEO- LIBERALISME	
A. Sejarah Welfare State.....	26
B. Hasil Dari Pemantapan Welfare State.....	28
C. Konsep Welfare State Kontemporer (Modern).	30
C. Skandinavia dan Ideologian Welfare State.....	34
D. Konsep Welfare State Gandhi.....	37

BAB III PROSES REAKTUALISASI KONSEP WELFARE STATE

MAHATMA GANDHI

- A. Ekonomi Rapelita Model Nehru..... 48
- B. IMF, Perang Irak dan Reformasi Ekonomi Tahun 1991 51
- C. Kekuatan Industri Informasi Teknologi Didukung Kebijakan
“ Brain Grain”..... 55
- D. Kebijakan Proteksi Terhadap Usaha Kecil Menengah..... 58
- E. Program di India Berjalan dengan Tujuannya..... 61

BAB IV HASIL REAKTUALISASI KONSEP WELFARE STATE MAHATMA

GANDHI DI INDIA MASA KINI

- A. India di Pusaran Neo-Liberalisme..... 65
- B. Perlawanan Petani Terhadap Monsanto..... 72
- C. Tarif Murah untuk Rakyat..... 75
- D. Kesederhanaan Masyarakat India Tercermin dari
Elitenya..... 77
- E. Kemajuan Industri Otomotif Berkat Kebijakan
Proteksi..... 79
- F. Kemajuan Pendidikan India..... 81
- G. Perlawanan Negara Berkembang..... 84

BAB V KESIMPULAN..... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kurang lebih tiga abad yang lalu, Liberalisme melalui sistem mekanisme pasar yang digunakan untuk berinteraksi di dalam sebuah negara pernah hadir didalam kehidupan sehari-hari bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Namun seiring berkembangnya Hubungan Internasional yang memudahkan interaksi baik antar negara maupun secara individual melalui teknologi informasi, Liberalisme yang dianut sebagian besar negara-negara Eropa, juga mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut mengubah mekanisme pasar yang tidak lagi hanya ada di dalam negeri, namun juga beralih ke luar negeri baik secara bilateral, regional, maupun global. Investasi, barang produksi juga merambah sampai keluar negeri sesuai hukum *supply* dan *demand*.

Selain itu, transformasi lain adalah, pemerintah juga dituntut untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu jitu bukan untuk memakmurkan negara seperti halnya liberalisme, namun memakmuran individu. Liberalisme baru ini, saat ini kita sebut dengan Neo-Liberalisme. Neo-Liberalisme, yang dianggap mampu membuat keuntungan signifikan oleh para pendukungnya, memang benar adanya. Namun prinsip keuntungan individual akhirnya mengakibatkan keegoisan dan kesenjangan. Banyak dari pengusaha penganut Neo-liberal, mengambil keuntungan secara sepihak dan malah justru bertindak

sesuka hatinya dan merugikan orang lain atau bahkan negara lain. Pada akhirnya kesenjangan pun terjadi. Saat ini penjajahan dilakukan secara halus. Melalui sector ekonomi, merambah ke sektor penting lainnya seperti politik, dan sosial budaya. Akhirnya membuat yang lemah tergantung dan ditindas oleh yang berkuasa.

Ketergantungan ini pada akhirnya menciptakan suatu monopoli dunia yang dimulai dari penjajahan secara ekonomi, lalu politik dan sosial budaya. Era Globalisasi yang digembar-gemborkan mampu mengubah tatanan dunia kearah yang lebih baik, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem Neo-Liberalisme membuat ketergantungan Negara lemah terhadap negara kuat sangat kental sehingga terjadi banyak terjadi penindasan dan penjajahan secara halus oleh Negara-negara kuat ini.

Ketertarikan penulis terhadap judul Konsep Welfare State Mahatma Gandhi Sebagai Ideologi Alternatif Untuk Menahan Neo -Liberalisme (studi kasus Negara India) terletak pada percobaan penulis dalam mencari sebuah alternatif untuk menahan bahaya laju Neo -Liberalisme melalui konsep *welfare state* yang digagas oleh Mahatma Gandhi. Serta ketertarikan penulis untuk menganalisa lebih lanjut bagaimana falsafah-falsafah Gandhi mampu diimplementasikan di India masa kini dengan harapan memberikan pengetahuan baru serta mampu menjadi ilmu yang berguna di masa yang akan datang.

B. Latar Belakang Masalah

Jika mendengar kata “Neo-Liberalisme”, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah monopoli pasar serta kekuatan negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa. Era Globalisasi memang merupakan era dimana penjajahan secara fisik tidak lagi berlaku, melainkan penjajahan secara ideologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Kapitalisme, merupakan landasan utama Neo-Liberalisme dalam bertindak serta mengambil kebijakannya. Kapitalisme sendiri mempunyai makna pengembangan azas hak milik pribadi yang pada intinya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apa saja secara terang-terangan. Dalam tatanan dunia Internasional baru, asas inilah yang telah telah melahirkan Neo-Liberalisme, atau Liberalisme baru di era ini. Neo-liberalisme merupakan sebuah wabah yang sangat mengerikan bagi negara-negara berkembang. Negara berkembang dipaksa untuk tunduk terhadap sistem ekonomi dunia yang menggerogoti segala aspek kehidupan masyarakat negara-negara berkembang. Segala bentuk potensi baik alam maupun manusia dibabat habis demi kepentingan kas Negara -negara penganut Neo-liberalisme. Neo-liberalisme sendiri secara garis besar merupakan perwujudan liberalisme lama yang mengalami pergeseran pasca perang dunia pertama seiring dengan semakin jelasnya persaingan bebas secara ekonomi politik di dunia Internasional. Neo-Liberalisme sendiri mempelajari tentang bagaimana integrasi menghidupi dirinya sendiri.

Kerjasama di satu wilayah akan membuka jalan bagi kerjasama di wilayah lain.¹ Perbedaan antara Liberalisme dan Neo-Liberalisme hanya terletak secara kontekstual, dimana Liberalisme klasik hanya berlaku secara domestik, sementara Neo-Liberalisme, berlaku secara universal dan Internasional. Hal ini dikarenakan, Neo-Liberalisme menciptakan aturan-aturan pasar yang disamakan bagi seluruh negara melalui lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang perekonomian dunia. Meski mulai muncul pasca perang dunia pertama, Neo-liberalisme mulai jelas tampak pada akhir perang dunia kedua tahun 1945 berakhir dan mulai berkembang memasuki fase perang dingin tahun 1970.

Seiring dengan pertumbuhan demokrasi yang cepat saat itu, kaum Neo-liberalis juga mengambil peran sebagai aktor perdamaian dan anti perang serta menggantinya menjadi sebuah jalinan korporasi dan kerjasama ekonomi agar dapat terhindar dari perang. Dalam perkembangannya, seiring dengan tumbuhnya kerjasama ekonomi antar negara, banyak forum-forum kerjasama baik Internasional, regional, maupun bilateral yang mengakibatkan negara-negara yang berkembang atau dunia ketiga merasa perlu untuk menggantungkan diri kepada Negara-negara besar sehingga bisa terhindar dari konflik-konflik antar negara.

Kenyataannya, negara-negara besar penganut Neo-Liberalisme tersebut mengambil momentum untuk memanfaatkan negara-negara berkembang dan berakibat terjadinya monopoli ekonomi di dunia serta terciptanya bermacam

¹ Robert Jackson & George Sorensen, *Introduction to International Relations*, terj. Dadan Suryadipura, Pustaka Pelajar, 2005, hal 63-64

sistem dunia baru. Salah satu sistem itu adalah sistem pasar bebas yang diusung oleh Neo-Liberalisme, yang mau tidak mau harus diikuti oleh negara-negara dunia ketiga tersebut. Karena jika tidak, mereka akan dikucilkan dari dunia Internasional.

Sistem ekonomi pasar bebas sendiri adalah dimana kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah dan apabila setiap individu di dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan maka akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh.² mekanisme pasar akan dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang efisien dan kemakmuran. Kaum Neo-Liberalis berusaha mewujudkan sistem pasar bebas agar mampu mendapat profit yang lebih banyak lagi. Hal ini mereka wujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga Internasional yang membuat peraturan bersama tentang perekonomian global. Pengaruh Neo-liberalisme di negara-negara berkembang bisa dilihat dengan jelas. Berkurangnya kedaulatan negara dalam pemutusan kebijakan ekonomi dalam negeri merupakan salah satu dampak buruk Neo-liberalisme di negara-negara dunia ketiga. Hal ini diakibatkan oleh ketergantungan yang diciptakan sistem dunia antara negara berkembang terhadap negara maju yang memaksa negara-negara ini mengubah kebijakan dan menguntungkan investor yang masuk.

Pada dasarnya, untuk mengurangi ketimpangan pasar dan kelompok kaya dan miskin dalam suatu negara, harus ada intervensi pemerintah dengan membuat kebijakan yang adil bagi rakyatnya. Kenyataannya hal itu justru

² Sistem ekonomi Pasar Bebas, diakses pada tanggal 3 Februari 2011 dari, <http://www.scribd.com/doc/35271773/Sistem-Ekonomi-Pasar-Bebas>

dimanfaatkan oleh elite pembuat keputusan untuk meraup keuntungan melalui kerjasama investor dengan negara³. Sementara itu, pasar tidak mengenal ketimpangan dan tetap berjalan pada koridornya untuk mendapatkan keuntungan.

Hal inilah yang membuat elite negara-negara berkembang terlena dan lupa kalau mereka punya tanggung jawab terhadap rakyat yang mengakibatkan ketergantungan antara negara dunia ketiga terhadap Negara-negara maju semakin besar. Kemampuan Neo-Liberalisme dalam menekan Negara-negara dunia ketiga untuk tunduk terhadapnya sangatlah kuat. Melalui berbagai forum dan kerjasama, investor mampu masuk ke dalam sistem pemerintahan suatu negara dan mempengaruhi pengambil keputusan kebijakan baik secara paksa maupun secara halus.

Adanya lembaga-lembaga Internasional seperti, *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, serta *World Trade Organization* (WTO), yang terlahir dengan dalil mencoba untuk mengurangi penduduk miskin di dunia dan mencapai kemakmuran dunia, nyatanya semakin memperburuk keadaan dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Kebijakan-kebijakan ekonomi global dibuat seragam agar dengan alasan agar Negara-negara miskin mampu mengikuti sistem pasar global dan menghindarkan mereka dari kemiskinan dan ikut serta memutar roda ekonomi

³ Michael P Torado, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Jilid Enam), Penerbit Airlangga, Jakarta, 1998, hal 35-36

global.⁴ Entah sengaja atau tidak, hal ini sebenarnya merupakan syarat bagi pasar bebas untuk bekerja secara efisien dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara-negara miskin.

Salah satu contoh kebijakan itu adalah *Structural Adjustment Program* (SAP) atau Program Penyesuaian Struktural. Kebijakan SAP ini merupakan kebijakan bersama IMF dan World Bank yang dikontrol dengan ketat, dan negara yang tidak mematuhi akan mendapatkan hukuman fiskal. Kebijakan-kebijakan SAP diantaranya adalah penghapusan tarif-tarif yang membantu industri kecil, penghapusan peraturan-peraturan dalam negeri yang sekiranya dapat menghambat atau terlalu mengatur tentang masuknya investasi luar negeri, sampai dengan pertanian dan bahan baku yang berorientasi ekspor.⁵ Hal ini jelas tidak menguntungkan negara miskin, sebaliknya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berkuasa.

Pertanian dan bahan baku yang berorientasi ekspor misalnya, hanya akan menambah persediaan yang sudah ada dipasar karena diekspor dari berbagai negara. Hasilnya, harga barang-barang ekspor tersebut akan dijual dengan harga dibawah produksi dan hanya akan membuat negara-negara pengekspor semakin terpuruk. Bukan hanya IMF, WTO, dan World Bank yang menjadi indikasi semakin terpuruknya Negara dunia ketiga di dalam sistem pasar bebas.

Contoh lain pengaruh buruk Neo-Liberalisme di Negara-negara berkembang adalah tentang permasalahan Hubungan Industrial antara tenaga

⁴ The International Forum On Globalization, *Globalisasi, Kemiskinan, dan Ketimpangan*, terj. A.Widyamartaya "et.al", Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2004, hal 8-10.

⁵ *Ibid*, Hal 16-18

kerja/buruh pabrik dengan perusahaan-perusahaan Multi National Cooperation (MNC). Para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik MNC digaji dengan upah yang sangat rendah dan bahkan diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (PHK) sepihak seringkali menjadi problematika yang dihadapi oleh buruh-buruh pabrik yang bekerja di perusahaan-perusahaan Multi Nasional.

Hubungan Industrial haruslah berlandaskan asas-asas kemanusiaan dan mempunyai pengaturan hak dan kewajiban yang baik di dalam sebuah perusahaan. Buruh dan majikan harusnya bekerjasama dalam memajukan perusahaan.⁶ Namun pada kenyataannya, di negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Laos dll, buruh digaji dengan upah yang sangat rendah dan seringkali ditindas oleh majikan/perusahaan.

Pengaruh Globalisasi serta Neo-Liberalisme sebagai sistem baru dunia saat ini, demokrasi sekalipun yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik saat ini dalam menjalankan sebuah negara, ternyata sudah menjadi celah baru bagi agen-agen Neo-liberalis untuk mengembangkan sayapnya di Negara-negara berkembang.

Dengan alasan mendorong demokratisasi politik dan mendorong kemakmuran, agen-agen Neo-liberalis mencoba mengambil alih kebijakan publik yang di pegang oleh lembaga-lembaga pemerintahan di dunia. Kapitalisme dan Neo-Liberalisme yang telah memunculkan aktor-aktor transnasional baru yaitu perusahaan Multi National Cooperation (MNC),

⁶ Adrian Sutedi, S.H.,M.H., *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, 2009, hal 108-110

serta forum-forum kerjasama ekonomi, pada akhirnya memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan serta meluasnya kemiskinan membuat demokrasi itu sendiri terancam dan tidak berjalan sesuai dengan semestinya.⁷ Demokrasi telah menjadi alat baru bagi Neo-Liberalisme untuk memperlebar kekuasaannya.

Globalisasi yang saat ini didengung-dengungkan dan dianggap dapat memajukan kesejahteraan dunia kini hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa. Kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap lah menjadi permasalahan utama dan bahkan menjadi semakin memburuk.

Kemajuan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara merupakan harga mati jika ingin menang dalam persaingan dunia saat ini. Lahirnya berbagai lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF yang diikuti dengan dibentuknya beberapa lembaga pasar bebas seperti AFTA, merupakan bukti bahwa Neo-Liberalisme berdiri kokoh sebagai sistem tatanan dunia saat ini. Berkembangnya aktor-aktor transnasional baru yang mempunyai kekuasaan sebagai pemegang ekonomi dunia ketiga yaitu MNC, juga menjadi bukti sah betapa globalisasi menjadi momok menakutkan bagi negara sedang berkembang.

Salah satu negara yang terkena dampak dari Neo-Liberalisme adalah India. India merupakan negara dengan penduduk terbanyak kedua setelah China, dan memiliki rapor buruk tentang kelaparan dan kemiskinan. India merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1947.

⁷ Nanang Pramuji Mugasejati dan Ucu Hartanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, 2006, Hal 63-65.

Memakai sistem pemerintahan republik federal atau lebih jelasnya Parlemen Bikameral (dua kamar) dengan sistem multipartai yang kuat.

Parlemen India terdiri dari dua kamar yaitu majelis rakyat atau *Lok Sabha*, yang berisikan 545 orang, dan majelis Negara atau *Rajya Sabha* yang berisikan 250 orang. India memiliki 28 negara bagian yang dibagi dalam 6 distrik kota.⁸ Negara yang berpenduduk lebih dari satu milyar ini selalu dianggap lamban dalam meningkatkan pertumbuhan negaranya. Setelah kemerdekaannya, di bawah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru memulai pembangunan sektor ekonomi India dengan sistem ekonomi terencana (model Nehru).

Selama periode kekuasaan Nehru, India hanya mengandalkan perusahaan Negara dan menolak pemodal asing. Peran swasta domestik diikutsertakan namun diawasi ketat oleh pemerintahan.⁹ Pertumbuhan ekonomi India memang meningkat, tetapi dapat dikatakan gagal memberikan sesuatu yang maksimal. Salah satu sisi negatif model ini adalah munculnya berbagai permasalahan birokrasi.

Proses perizinan menjadi ladang mencari uang, dan muncul sikap pejabat pilih kasih. Model Nehru dengan ekonomi terencana memang tidak banyak menghasilkan bagi India. Kemiskinan dan kelaparan tetap saja melanda negeri ini. Tetapi model Nehru ini justru mempunyai sisi positif dan menjadi titik balik perekonomian India di masa depan. Perdana Menteri Nehru memilih menggunakan sistem ini karena trauma akan masa penjajahan

⁸ Irwan Suhanda, *India Bangkitnya Raksasa Baru Asia (Calon Pemain di Era Globalisasi)*, Penerbit Kompas, 2007, Jakarta, hal xi-ix.

⁹ *Ibid.* Hal 10.

membuat Nehru merasa tidak memerlukan peranan asing selama kurang lebih 44 tahun.

Pada masa-masa itu, India mulai tergodanya oleh pengaruh Neo-Liberalisme yang mulai menjangkit di tahun 70-an. Karena kepasrahan dan ketidakberdayaan, India merasa perlu mengubah sistem ekonominya agar menjadi lebih baik lagi. Tahun 1991 menjadi titik balik perekonomian India. Pada 1991, P.V. Narasimha Rao menjadi perdana menteri dan melakukan perubahan penting dalam kebijakan ekonomi. Banyak kontrol terhadap sektor swasta yang dihapus dan monopoli negara pada bidang-bidang tertentu, seperti transportasi udara, diperlonggar.

Secara umum, ekonomi menjadi terbuka dengan adanya pengurangan kontrol tarif dan dorongan bagi pihak asing untuk berinvestasi. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan terutama untuk meraih angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Sistem seperti ini bertahan sampai dengan saat ini. Pertumbuhan ekonomi India tertinggi terjadi 2010 lalu, yaitu mencapai 11 persen. Angka yang cukup luar biasa mengingat India bukanlah negara terkategori maju. India juga mulai melebarkan sayapnya di berbagai industri dan bidang teknologi. Tetapi ada hal yang aneh dalam sistem perekonomian India saat ini.

Jika memang India telah beralih ke Neo-Liberalisme beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya turut campur pemerintah masih sangat kental terlihat dalam penentuan kebijakan India. India tidak sepenuhnya menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar.

Seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk Usaha Kecil (UK) sampai-sampai 40 persen pertumbuhan perekonomian India ditopang oleh UK. Atau sektor pertanian yang sekitar 58 persen penduduknya bekerja di sektor ini dan menyumbang 22 persen Produksi Domestik Bruto (PDB). Masyarakat India masih menggunakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi teknologi, India sangat luar biasa dengan menciptakan berbagai teknologi yang tergolong murah namun bermutu. Mulai dari satelit mikro, sampai dengan bahan bakar *compressed natural gas* untuk mengurangi polusi di India¹⁰

Baik dari segi transportasi, pemenuhan kebutuhan pokok, sampai dengan teknologi, masyarakat India masih menggunakan produknya sendiri. Disamping itu, sumber daya manusia India sangat luar biasa pekerja keras. Mereka rela digaji berapapun dalam pekerjaannya. Hal ini juga yang membuat pasar India masih tergolong sulit dimasuki, lantaran masyarakat India masih memakai kesederhanaannya dalam hidup sehari-hari.¹¹ Terlepas dari itu, pengaruh kaum yang menentang keras Neo-Liberalisme masih kuat dan rata-rata berasal dari partai sayap kiri India dan sektor swasta di India. Faktor budaya dan faktor sejarah sangat mempengaruhi perkembangan India masa kini.

Adalah tokoh perjuangan India yang membawa pengaruh yang besar itu terhadap masyarakat India, Mohandas Karamchand Gandhi atau sering

¹⁰ *Ibid.* Hal 92-93.

¹¹ *Ibid.* Hal 14-15.

disebut Mahatma Gandhi. Masyarakat India saat ini bukan hanya sekedar mewarisi ajaran Gandhi, tetapi juga mengaktualkannya.

Falsafah seperti *Satyagraha*, *Ahimsa*, *Sarvodaya*, maupun *Swadeshi*, masih tetap mewarnai kehidupan India dalam sehari-harinya. Gandhi sendiri bukan hanya seorang pembawa perdamaian, tetapi juga mempunyai pemikiran politik dan visi ekonomi yang luar biasa, terutama tentang kesejahteraan. Gandhi yang hidup di masa penjajahan Inggris, merasakan betul penderitaan rakyat India di masa lalu. Lalu Gandhi membangun sebuah konsep Welfare State yang bukan hanya pada materi, tetapi juga manusia sebagai pemeran utamanya, atau singkatnya materialis-spiritual.¹²

Dalam perang kemerdekaan melawan Inggris, salah satu bentuk perlawanan ekonomi yang dilakukan oleh Gandhi adalah dengan memboikot masuknya tekstil hasil industri tekstil Inggris yang berkembang pesat berkat bantuan mesin uap dan kapas murah dari India.

Setelah itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Gandhi mempopulerkan pemintalan *khadi* (kain tenun khas India) dengan menggunakan *charka* (alat tenun khas India) yang pada akhirnya diabadikan sebagai simbol ekonomi kerakyatan yang juga sering disebut sistem ekonomi roda pintal.

Dampak dari kebijakan ini terlihat begitu jelas. Terjadi pengangguran besar-besaran di Inggris setelah India tidak lagi mengekspor kapas murah lagi ke pabrik kapas di Leichestre. Gandhi juga dikecam akibat kampanyenya

¹² Visi ekonomi Mahatma Gandhi, diakses pada tanggal 27 Februari 2011
<http://averroespress.net/review-press/resensi-buku/259-visi-ekonomi-Mahatma-Gandhi.html>

mempopulerkan *khadi* di kalangan masyarakat India dan dianggap anti-industrialisasi.

Namun ia justru mengatakan bahwasanya India tetap menerima mesin-mesin uap itu jika memang dapat mengurangi kelaparan dengan catatan, mesin-mesin itu harus tersentralisasi dan dikuasai oleh Negara, dan porsi terbesar pembangunan sandang dan pangan tetap ada di tangan rakyat desa .

Salah satu konsep Gandhi yang dipertahankan sampai saat ini adalah dengan tetap menerapkan sistem ekonomi *swadeshi*. Sistem ekonomi *swadeshi* adalah sistem dimana masyarakat menggunakan produksi dalam negeri sehingga mempunyai daya tawar yang tinggi dan mampu melawan kekuatan industri asing.¹³ Di India sendiri, Usaha Kecil (UK) semaksimal mungkin dijadikan penopang utama perekonomian Negara dan dilindungi oleh Negara. Usaha Kecil dilindungi dan dibuatkan kebijakan yang pada awalnya mencadangkan subsektor industri tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh UK saja sementara jika usaha menengah dan besar ingin masuk, maka mereka harus mengekspor 50 persen produksinya .

India memang tengah bergolak dengan masuknya Neo-Liberalisme ke berbagai sektor di dalam negeri. Namun dengan tertanamnya budaya dan pemikiran-pemikiran Gandhi, mampu menjadi penangkal meledaknya Neo-Liberalisme di India. Pemikiran Gandhi sendiri diakomodasi dalam *National Community Development Program*

¹³ Mahatma Gandhi dari satyagraha menuju Negara kesejahteraan, diakses pada tanggal 10 Februari 2011 dari <http://gazali.wordpress.com/2008/01/07/mahatma-gandhi-dari-satyagraha-menuju-negara-kesejahteraan/>

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah masalah yang akan dianalisa yaitu :

“Bagaimanakah Konsep *Welfare State* Ala Mahatma Ghandi Diimplementasikan Dalam Konteks India Masa Kini Dalam Menghadapi Neo-Liberalisme”

D. Kerangka Pemikiran

a) *Konsep Welfare State Mahatma Gandhi*

Di dalam konsepnya tentang kesejahteraan, dalam membentuk sebuah *welfare state*, visi ekonomi kenegaraan Gandhi tampak berbeda dengan visi ekonomi para penganut paham strukturalis. Jika paham kapitalisme menekankan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai hal yang determinan, Gandhi tidak demikian. Prinsip pembangunan ekonomi negara kapitalis Barat adalah material.

Sedangkan konsep Gandhi adalah hasil perpaduan antara unsur spiritual dan material. Bagi Gandhi, kesejahteraan manusia dibagi dalam kesejahteraan material dan nonmaterial¹⁴. Dasar logikanya adalah, bahwa praktik kebaikan tidak lepas dari hal-hal material, maka kebaikan juga harus diterapkan dalam seluruh aktivitas manusia. Pijakan prinsip ini adalah, bahwa manusia merupakan pertimbangan utama.

¹⁴Francis Alappatt, *Mahatma Gandhi (prinsip hidup, pemikiran politik, dan konsep ekonomi)*, Penerbit Nusamedia, Terj. S. Farida, 2005, Hal 256.

Konsep *welfare state* yang dikonsepsikan oleh Gandhi dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1) ***Satyagraha***, yang artinya berpegang teguh pada kebenaran. Prinsip ini banyak menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam kerukunan dan landasan moral menjadi bagian terpentingnya. Gandhi tidak menginginkan adanya perbedaan kelas sosial. Meskipun Gandhi seorang Hindu yang taat, Ia tetap berpendapat semua orang itu sama derajatnya. Gandhi sangat menentang pengkastaan yang ada dalam ajaran Hindu. Gandhi beranggapan bahwasanya semua manusia berhak bersuara dan menyatakan aspirasinya terlepas dari golongan mana ia berasal.¹⁵ Prinsip lain yang terkandung dalam *Satyagraha* diantaranya adalah anti kekerasan, dan anti pembedaan baik kasta maupun agama. Memecahkan permasalahan Multikultural memang sangat sulit, terlebih, Gandhi dibunuh oleh seorang Hindu fanatik karena Ia dianggap terlalu membela Islam. Apalagi ditambah dengan permasalahan perbatasan antara India dan Pakistan yang melibatkan kelompok Muslim dan Hindu. Namun hal ini juga tidak menyurutkan semangat para aktivis di India untuk terus memperjuangkan pluralisme di India. Disisi lain dalam ekonomi, Gandhi menggambarkan bahwasanya kesetaraan bukan berarti semua harus sama. Pendapatan sama, atau yang diterima harus sama. Namun justru Gandhi mempersilahkan semua orang untuk mengembangkan potensinya dan mencapai kemakmuran individunya. Namun, aspek

¹⁵ M.K. Gandhi, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*, Penerbit Narasi, Terj. Andi Tenri W, 2009, Hal 461-462.

moral harus ada di atas aspek ekonomi, jadi si kaya nantinya harus dan berkewajiban membantu si miskin. Namun bukan berarti jika dibantu si miskin tidak bekerja. Dalam falsafah ini Gandhi juga menjelaskan bahwasanya rakyat India juga harus bekerja keras dalam menghidupi dirinya sendiri dan belajar untuk tidak terlalu tergantung terhadap orang lain. Hal inilah yang membuat rakyat India pekerja keras dan tanpa pamrih.

2) *Swadeshi*, yaitu penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan mengembangkan Industri dalam negeri dan menghemat devisa. Konsep ini lebih mengedepankan pemakaian produk dalam negeri, sehingga dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang bermutu. Gandhi pertama menerapkan konsep ini ketika Gandhi dan sejawatnya memperjuangkan pemakaian *Khadi* yang menjadi simbol sistem ekonomi roda pental atau *Charka*.¹⁶ India sendiri memiliki banyak Industri dan UKM di negaranya. Sekarang ini, 40 persen ekonomi India bergantung pada kinerja UKM. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung kinerja UKM seperti penelitian, kredit, dan lingkungan usaha yang baik. Jadi meskipun India telah meninggalkan sistem ekonomi sosialis dan menuju pasar bebas, proteksi UKM selama 40 tahun membuat UKM kuat dan tidak takut bersaing dengan investor asing. Terlebih lagi, India hanya mengimpor jika memang benar-benar membutuhkan.

¹⁶ Alappat, *Op. Cit.* Halaman 105-107

b) Konsep Welfare State Kontemporer (Modern)

Welfare state atau yang lazim di sebut sebagai Negara Kesejahteraan, merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep *welfare state* tidak akan dapat kita pisahkan dari sistem politik-ekonomi yang berkembang.¹⁷ Dr. Goran Adamson, yang merupakan seorang dosen di Land University, Swedia, menjelaskan bahwasanya konsep *Welfare state* telah mengalami evolusi di zaman modern ini. Modernitas disini dimaknai sebagai kemampuan negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tanggung jawab negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai “teman” bagi warga negaranya.

Makna kata “teman” merujuk pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Birokrat merupakan alat dan garda depan negara yang secara langsung melayani warga negara. Birokrat “diharuskan” bersikap netral dengan cara tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial warga Negara sebagai dasar pertimbangan pemberian pelayanan. Penganut Negara Kesejahteraan percaya jika negara memberikan banyak bagi warga negara

¹⁷ *Ibid.* Hal 173-175

maka akan terjadi penurunan demonstrasi, kekerasan maupun anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dipinggirkan atau merasa bahwa distribusi keuntungan negara tidak berjalan dengan baik.

Empat hal yang disediakan oleh Negara Kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain:

1. Menciptakan keamanan
2. Mensuplai pelayanan sosial
3. Mengurangi biaya sosial masyarakat
4. Mengontrol angka reproduksi

Negara Kesejahteraan menolak konsep revolusi sosial ala kaum Marxis, karena tanpa revolusi yang diyakini kaum Marxis, kesejahteraan warga negara tetap bisa diaplikasikan melalui konsep *welfare-state*. Konsep revolusi Marxis digantikan oleh perubahan bertahap yang tercermin dalam agenda reformasi yang cenderung tidak radikal. Nilai penting yang dibawa Negara Kesejahteraan adalah mereduksi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si miskin.¹⁸ Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara ini salah satu caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, memiliki hak yang sama dan setara.

Dalam kerangka Negara Kesejahteraan, pihak buruh tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif dalam membangun perekonomian sejajar dengan para pengusaha. Terdapat

¹⁸ Negara Kesejahteraan, diakses pada tanggal 17 April 2011 dari <http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>

pula para pengusaha yang tanpa intervensi dari Negara berupaya membangun forum terbuka dengan para buruh. Forum ini bertujuan untuk mencapai negosiasi kebijakan berdasarkan prinsip *win-win solution* antara pihak pengusaha dan pihak buruh. Negara Kesejahteraan mempercayai bahwa perubahan ekonomi secara cepat dan radikal justru akan memicu bencana besar. Laju perekonomian yang perlahan namun pasti akan membawa keselamatan ekonomi bagi Negara kesejahteraan.

Namun, segala sesuatu memiliki sisi baik dan buruk, begitu pula dengan sistem Negara kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak penuh untuk menekan dan memaksa warga negaranya dalam melakukan berbagai hal yang dianggap penting oleh Negara. Bentuk paksaan dan tuntutan seperti ini secara langsung membuat warga negara kehilangan kebebasannya. Hal ini menjadi sangat logis, jika mengingat bahwa kebebasan tidak berbanding lurus dengan keselamatan dan keterjaminan.

Masalah-masalah yang kerap atau sering terjadi di dalam sistem Negara kesejahteraan kontemporer adalah:

- 1) Pungutan pajak yang tinggi. Sistem Negara kesejahteraan menyediakan berbagai layanan gratis kepada masyarakatnya namun Negara menetapkan angka pajak yang sangat tinggi. Di Swedia misalnya, pajak berkisar di angka 25 persen.
- 2) Tingkat pengawasan yang tinggi oleh negara.

- 3) Negara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya sehingga negara akan menyalahkan sikap warganegara atas suatu tindakan yang berseberangan dengan aturan negara.
- 4) Tidak ada kebebasan. Kebebasan berbanding terbalik dengan keselamatan. Kebebasan adalah kekuatan terbesar seorang individu dan ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan maka tingkat keselamatan akan semakin rendah.

Selain itu, sisi negatif dari Negara kesejahteraan adalah semangat yang dimiliki warga negaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah menjamin keseluruhan hidup mereka (kesehatan, perumahan, pendidikan dll). menggambarkan sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu warga Negara meningkat maka beban pajak yang dibayar juga akan meningkat. Sedangkan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan dikenai kewajiban membayar pajak. Jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah sama untuk warga miskin atau warga kaya.

Potret sosial seperti ini membentuk satu perspektif di tengah masyarakat “buat apa bekerja keras jika akhirnya akan dikenai pajak yang tinggi dan mendapatkan jaminan yang sama dengan warga miskin dari pemerintah?”

“Buat apa bekerja keras jika pajak yang dibayarkan, diberikan untuk kaum miskin yang pemalas?” Perspektif seperti ini lambat laun namun pasti telah menggerogoti semangat kerja keras yang dimiliki oleh generasi terdahulu. Konsep *welfare state* seringkali bergantung terhadap

kondisi sosial-politik yang ada di dalam negaranya. Maka dari itu, *welfare state* mempunyai fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan budaya suatu Negara.

Konsep *welfare state* kontemporer ini akan dibandingkan dengan konsep *welfare state* Gandhi dalam implementasinya di India dalam menahan Neo-Liberalisme.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberi gambaran pengaruh buruk Neo-Liberalisme di era Globalisasi.
2. Untuk memberi alternatif ideologi terhadap pengaruh Neo-Liberalisme melalui konsep *welfare state* Mahatma Gandhi.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana S-1 Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini dengan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan fenomena yang terjadi, teknik pengumpulan data dari studi pustaka. Data diolah melalui literatur-literatur, buku, jurnal ilmiah, dan media, baik cetak maupun internet.

G. Jangkauan Penelitian

Wilayah kajian skripsi ini secara umum merupakan analisa yang menggambarkan tentang pengaruh Neo-Liberalisme di dunia saat ini yang dianggap tidak baik karena, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga menciptakan kesenjangan dalam tatanan dunia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menahan laju Neo-Liberalisme yang meluas yang salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *welfare state* Mahatma Gandhi dan menjadikannya sebuah ideologi yang diharapkan mampu menjadi ideologi alternatif menahan laju Neo-Liberalisme.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan akan dibagi dalam lima BAB yang akan diuraikan lebih dalam dan terdiri dari:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari, Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Hipotesa, Teknik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, akan menjelaskan tentang perbandingan konsep *welfare state* Mahatma Gandhi dengan konsep *welfare state* modern lainnya dalam menahan Neo-Liberalisme.

BAB III, akan menjelaskan tentang proses reaktualisasi ideologi *welfare state* Gandhi di India masa kini.

BAB IV, akan menjelaskan tentang hasil dari reaktualisasi ideologi *welfare state* Gandhi di India masa kini.

BAB V, akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua permasalahan diatas.

BAB II

**PERBANDINGAN ANTARA WELFARE STATE GANDHI DENGAN
WELFARE STATE KONTEMPORER DALAM MENAHAN
NEO-LIBERALISME**

Kesejahteraan seperti yang penulis uraikan sebelumnya, merupakan dambaan bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini dan selalu menjadi isu yang tak akan pernah habis untuk dibahas. Setelah mengalami transformasi selama beabad-abad, konsep tentang kesejahteraan dan lebih utamanya negara kesejahteraan (*welfare state*) kembali muncul ke permukaan di beberapa negara seperti Jerman, Swiss dan kawasan Skandinavia. Dengan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan, berbagai upaya dilakukan, termasuk mengubah ideologi dan mindset masyarakat.

Konsep ini kembali muncul ke permukaan dan dipopulerkan melalui berbagai fase perbaikan dan disesuaikan terhadap keadaan dunia Internasional saat ini, termasuk perbaikan terhadap munculnya berbagai masalah yang semakin membuat kesenjangan sosial dalam skala besar seperti Neo-Liberalisme dan era Globalisasi. Konsep *welfare state* sendiri menurut penulis, merupakan sebuah konsep yang tidak memihak siapapun dan hanya berusaha untuk mencarikan jalan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di dunia. Selain itu juga mencari jalan menuju kesejahteraan yang selalu diidam-idamkan ummat manusia.

A. Sejarah Welfare State

Pada dasarnya, nilai-nilai kesejahteraan sudah berkembang dari zaman dahulu ketika masyarakat masih bermukim di dalam komunitas-komunitas kecil. Hal ini bisa dilihat dari cara masyarakat dahulu saling bahu-membahu dalam mencari makanan dan berburu, saling tolong menolong, sampai dengan menciptakan hukum-hukum adat yang harus ditaati di dalam komunitas tersebut. Kesejahteraan seolah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman, sehingga walaupun konsep tentang kesejahteraan jarang disinggung secara gamblang di era ini, kesejahteraan tetap menjadi isu yang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas.

Dengan berkembangnya prinsip-prinsip kesejahteraan, maka dibuatlah sebuah konsep tentang kesejahteraan negara atau yang kita sering sebut Negara Kesejahteraan. Konsep Negara Kesejahteraan pertama kali muncul di Inggris yang diartikan sebagai terbebasnya seseorang dari kelaparan dan kemiskinan yang ekstrem. Konsep ini tertera di dalam undang-undang kemiskinan pada pemerintahan Elizabeth I di Inggris sekitar tahun 1598 dan diperbaharui lagi pada tahun 1601. Undang-undang ini menyerukan bahwa, kemiskinan harus dihapuskan dan jemaah gereja dijadikan sebagai unit basis dari administrasi lokal penghapusan kemiskinan.¹⁹ Selain itu, jemaah gereja juga wajib menyediakan kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak mampu bekerja karena sakit, kekurangan fisik dan juga orang tua jompo.

¹⁹ *Ibid.* Hal 174-175

Cara-cara yang ditempuh untuk membantu mereka ini adalah dengan meningkatkan pajak bagi setiap orang kaya yang ada dalam ruang lingkup gereja. Namun setelah berabad-abad, undang-undang ini mengalami kegagalan dalam penerapannya dikarenakan pengimplementasiannya di dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya, selama berabad-abad Inggris mencari formula untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang parah melalui berbagai perombakan undang-undang tentang kesejahteraan. Undang-undang tentang kesejahteraan ini akhirnya disempurnakan dengan dikeluarkannya undang-undang kemiskinan yang dilanjutkan dengan undang-undang asistensi nasional tahun 1948 di Inggris.

Tidak ada perbedaan mendasar antara undang-undang tahun 1906 dengan undang-undang tahun 1948. Perbedaan hanya terletak pada implementasi pelayanan yang dirubah seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, asuransi-asuransi, dan jaminan pokok lainnya yang nantinya akan menjadi instrument utama di dalam Negara Kesejahteraan modern.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep Negara Kesejahteraan mengalami berbagai modifikasi sehingga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi suatu negara itu sendiri. Pada dasarnya ideologian *welfare state* yang berkembang saat ini adalah dimana masyarakatnya mendapatkan jaminan penuh secara sosial, ekonomi dan politik. Salah satu yang bisa dijadikan pelajaran penting yang didapat dari undang-undang tentang kesejahteraan di Inggris adalah penerimaan secara kolektif di masyarakat secara keseluruhan atas tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya yang kurang

beruntung, demi mengentaskan mereka dari permasalahan kemiskinan yang parah.

Semangat tersebut lalu muncul dalam sistem yang lebih institusional. Tetapi, sistem ini lebih menunjukkan semangat kedermawanan individu daripada penyelesaian secara kolektif secara institusi²⁰. Dan hal inilah yang menjadi kelemahan mendasar bagi sistem kesejahteraan untuk bekerja. Pemanfaatan posisi dan kekuasaan oleh para dermawan akhirnya menjadikan jurang pemisah yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin yang berimbas pada perekonomian si miskin yang hanya bisa berharap belas kasih si kaya. Pada akhirnya si kaya tetap menjadi kaya, dan orang miskin semakin banyak.

B. Hasil dari Pemantapan Welfare State

Tidak dapat dipungkiri memang, bahwasanya konsep welfare state mampu memberikan sebuah perubahan yang signifikan terhadap negara yang menganutnya. Perubahan-perubahan dan perbaikan tersebut dapat kita lihat melalui aspek kesejahteraan manusia dan juga aspek kesejahteraan ekonomi. Dalam aspek kesejahteraan manusia, perbaikan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat di bidang jasa, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dalam negara kesejahteraan, kebanyakan bentuk pembelanjaan yang dilakukan oleh

²⁰ *Ibid*, Hal 60-65

negara meliputi pembelanjaan untuk konsumsi dan investasi.²¹ Negara menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyat.

Dengan cara ini, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap negara. Kontribusi ini diberikan melalui kerja dan pembelanjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan dari bantuan nasional dan jaminan sosial, fasilitas-fasilitas seperti perumahan yang diusung negara kesejahteraan. Melalui kebijakan jaminan kesehatan dan pendidikan, SDM mengalami peningkatan yang sangat baik.

Sistem pelayanan seperti ini sangat baik untuk meningkatkan potensi masyarakat dan mengurangi beban orang miskin. Dengan demikian, orang miskin tadi, tidak perlu lagi berfikir ulang untuk berbelanja dan secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada negaranya. Inilah salah satu hal yang paling mustahil terjadi pada orang miskin jika mekanisme dilandaskan pada sistem pasar bebas. Peningkatan kualitas hidup manusianya juga semakin membaik. Secara tidak langsung, sistem seperti ini akan meningkatkan pendapatan si orang miskin tadi. Hal ini juga dapat terjadi atas pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerataan konsumsi. Tentu saja, standar-standar kesejahteraan ini tetap bergantung dari di negara mana ini digunakan, karena jelas standar hidup di masing-masing negara berbeda-beda.

Secara ekonomi, sistem negara kesejahteraan juga mampu memberikan kontribusi yang baik bagi rakyat di sebuah negara. Dalam negara

²¹ *Ibid*, Hal 234

kesejahteraan, setiap masyarakat mendapatkan tunjangan baik bekerja maupun tidak. Namun kebijakan ini sering dikritisi karena tingginya pajak yang dikenakan terhadap orang yang bekerja. Hal ini akan membuat semangat kerja rakyat menurun karena meskipun menerima tunjangan, pajak yang diberlakukan tinggi. Jadi bekerja maupun tidak, hasilnya sama saja. Namun justru rakyat tidak kehilangan akal, banyak dari mereka yang berwiraswasta karena dari situ bisa menutupi pembayaran pajak yang pada umumnya disamaratakan bagi pekerja. Sebaliknya hal ini justru membuat mereka menjadi hemat dan membudidayakan menabung.²² Karena tingkat pajak yang tinggi, pada umumnya masyarakat menghemat agar bisa membayar pajak.

C. Konsep Welfare State Kontemporer (Modern)

Letak erbedaan antara konsep *welfare state* klasik dengan Konsep *welfare state* modern sendiri terletak pada implementasi dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya. *Welfare state* modern pada umumnya lebih menggunakan cara-cara seperti memberikan jaminan kepada masyarakatnya, sehingga terhindar dari kemiskinan dan kelaparan.²³ Karena dengan ini mereka percaya bahwa dengan memberikan jaminan kepada masyarakatnya,

²² *Ibid*, Hal 46-49

²³ Upaya mewujudkan negara kesejahteraan, diakses pada tanggal 12 April 2011 dari <http://stihyusticia.blogspot.com/2011/03/upaya-mewujudkan-negara-kesejahteraan.html>

maka masyarakat akan patuh terhadap pemerintah dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di negara itu.

Jaminan-jaminan yang ditawarkan oleh konsep *welfare state* modern adalah jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dll. Pada intinya negara merupakan pemegang kunci dan bertanggung jawab terhadap warga negaranya atas apapun yang menimpa warganya. Di Skandinavia (Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark), konsep Negara kesejahteraan modern telah menjadi ideologi dan sistem yang berjalan dengan cukup baik. Salah satu kunci keuntungan dari sistem Negara kesejahteraan adalah tidak ada satupun warga Negara yang menderita atau dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial. Syarat-syarat *welfare state* modern secara umum adalah:

1. Sistem perpajakan yang baik.
2. Kalau terdapat banyak UKM maka tingkat kesejahteraan akan semakin kecil (pengaruh dari *tax system*)
3. Ada *social trust* yang besar, tanpa ada *social trust* maka tidak ada pembayar pajak.
4. Perlu adanya serikat pekerja yang kuat.
5. Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen baik etnis maupun agama).

Adanya institusi sosial yang kuat akan membuat masyarakat terbiasa dengan *rules of the game* yang diciptakan oleh pemerintah. Institusi sosial

merupakan struktur dasar masyarakat yang berperan dalam menciptakan keteraturan masyarakat

Nilai penting yang dibawa *welfare state* adalah mengurangi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si miskin²⁴. Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara ini salah satu caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, memiliki hak yang sama dan setara. Di dalam *welfare state*, pihak buruh tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif dalam membangun perekonomian sejajar dengan para pengusaha. Terdapat pula para pengusaha yang tanpa intervensi dari negara berupaya membangun forum terbuka dengan para buruh. Forum ini bertujuan untuk mencapai negosiasi kebijakan berdasarkan prinsip sama-sama untung antara pihak pengusaha dan pihak buruh.

Gagasan *welfare state* mempercayai bahwa perubahan ekonomi secara cepat dan radikal justru akan memicu bencana besar. Laju perekonomian yang perlahan namun pasti akan membawa keselamatan ekonomi bagi *welfare state*. Namun dalam penerapan yang sesungguhnya, konsep *welfare state* sangat fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi-politik, serta budaya di dalam negara yang menganutnya. Di Jerman misalnya, karena dianggap terlalu besar mengeluarkan biaya untuk kesejahteraan warga, membuat beberapa kebijakan dirubah. Seperti, jaminan yang selama ini pasti

²⁴ Pengertian negara sejahtera, diakses pada tanggal 3 Februari 2011 dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2090873-pengertian-negara-sejahtera-welfare-state/#ixzz1JyEbid9V>

didapatkan, diganti dengan pinjaman agar masyarakat miskin itu mau bekerja dan tidak menggantungkan diri pada negara.

Seperti halnya konsep-konsep lain, konsep *welfare state* juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Beberapa diantaranya adalah jaminan-jaminan yang diberikan oleh kebijakan *welfare state*, menjadikan semangat kerja masyarakat menurun. Ada dua kelompok yang mengalami hal ini di dalam *welfare state* yaitu kelompok yang menerima tunjangan, dan kelompok yang membayar pajak yang tinggi.²⁵ Terutama mereka yang dikenakan pajak secara progresif yang dihitung berdasarkan rentang pendapatan yang diperoleh dari kerja ekstra atau kerja lebih keras.

Permasalahan ini merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh penganut *welfare state*. Dan meskipun sudah berbagai cara dilakukan, penurunan semangat kerja masih saja terus ada. Contohnya, ketentuan tentang upah para pensiunan telah menurunkan minat mereka untuk bekerja paruh waktu²⁶. Penurunan semangat bekerja juga dikarenakan jika mereka bekerja paruh waktu, maka dana pensiun juga akan berkurang. Sama halnya dengan laki-laki yang berasal dari keluarga miskin. Pria ini tidak akan berminat untuk bekerja lebih giat dibandingkan apa yang ia kerjakan sekarang. Karena jika ia bekerja lebih keras, maka dia akan dikurangi tunjangannya, dan bertambah membayar pajaknya. Hal ini juga yang membuat para pekerja keras pada akhirnya tidak mau lagi bekerja, karena akan membayar pajak yang mahal.

²⁵ Alappat, *Op. Cit.* Halaman 236-237

²⁶ *Ibid*, Hal 46-49

Apalagi mereka yang terkena pajak progresif karena mempunyai kerja lebih dari satu, merasa bahwsanya jam kerja mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan karena pasti dipotong pajak yang tinggi. Pada akhirnya kritik terhadap *welfare state* pun menagatakan bahwa, *welfare state* menghilangkan potensi individu setiap manusia hanya demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan.²⁷ Manusia-manusia yang memiliki potensi berada pada posisi yang tidak adil karena kemampuan yang mereka miliki harus dibayar dengan pajak yang terkadang terlalu berlebihan.

D. Skandinavia dan Ideologian Welfare State

Nama Skandinavia merujuk pada wilayah Semenanjung Skandinavia yang berada di bagian utara Benua Eropa. Sehingga bangsa -bangsa yang mendiami wilayah tersebut disebut juga sebagai Bangsa Skandinavia. Di daerah semenanjung ini terdapat tiga negara yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, sedangkan Denmark dan Eslandia terpisah dari semenanjung tersebut karena Denmark berada di utara Jerman dan Eslandia yang terletak di Laut Utara antara Benua Eropa dan Pulau Greenland. Namun kedua negara tersebut termasuk dalam wilayah dihuni oleh bangsa Skandinavia. Negara - negara skandinavia juga lazim disebut sebagai negara “nordic” karena lokasinya di utara Eropa dan masuk dalam lingkaran arktik atau wilayah yang telah dekat dengan zona kutub utara.²⁸ Dengan kondisi iklim yang sedikit menyamai iklim di kutub.

²⁷ Konsep welfare state, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 dari <http://www.oberlin.edu/politics/howell/Politics%20317%20Syllabus%202004.pdf>

²⁸ Nuraeni. S, *Regionalisme Dalam Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 2010,

Bangsa Skandinavia berasal dari suku bangsa Germanik, Goths, Vandal dan Saxon yang telah ribuan tahun mendiami wilayah yang sekarang menjadi negara-negara nordic di atas. Mereka menyebut diri mereka sebagai Norsemen atau Orang Utara. Pada abad XI masehi, Bangsa Skandinavia dikenal dengan sebutan Bangsa Viking. Pada masa tersebut Bangsa Viking ditakuti di seluruh Benua Eropa karena mereka terkenal sebagai bajak laut kejam yang membantai perempuan dan anak-anak selain merompak habis harta benda penduduk di setiap daerah yang mereka serang.

Dengan kemahiran mereka sebagai Pelaut ulung, Bangsa Viking menguasai lautan Eropa, mereka menindas Bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol bahkan Rusia yang pada era itu masih terbelakang atau dikenal sebagai Abad Kegelapan. Namun perilaku buruk dan brutal dari bangsa Viking tersebut hanyalah kisah pada masa lalu yang kini sudah menjadi legenda dan santapan para penikmat sejarah.

Pada Abad Milenium ini Bangsa Skandinavia identik dengan predikat sebagai salah satu bangsa dengan berbagai keunggulan di berbagai bidang kehidupan. Tidak banyak orang yang mengetahui sistem hidup di Negara-negara Skandinavia karena memang jarang sekali ada isu yang memunculkan mereka ke permukaan.

Di Negara-negara Skandinavia (Nordic), seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia, kesejahteraan dan *welfare state* sangat populer dan bahkan sudah menjadi ideologian. Hal yang paling mencolok adalah pemungutan

pajak yang sangat tinggi. Di Swedia misalnya, angka pajak mencapai 25 persen.²⁹ Pajak yang sangat tinggi. Sebagai timbale baliknya, melalui pajak warganya ini lah pemerintah dapat melayani masyarakat dengan sangat baik. Subsidi dan jaminan sosial yang diberikan hampir di semua sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, tunjangan pengangguran, sampai dengan tunjangan hari tua. Belanja negara rata-rata mencapai 60 persen dari total anggaran negara.

Negara-negara Skandinavia terkenal dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, dan juga pengembang di bidang teknologi dan otomotif seperti Volvo, Sony-Ericsson, Nokia, dan lainnya. Dari perusahaan-perusahaan besar inilah negara menarik pajak yang tinggi, lalu dibelanjakan untuk melayani warga negaranya. Meskipun begitu, Negara-negara Skandinavia ini bukannya tidak mengalami masalah. Di Swedia misalnya, dalam perjalanannya banyak mengalami masalah pengangguran yang mencapai angka 5-6 persen pada tahun 2006. Hal ini diakibatkan oleh penyakit malas bekerja. Semangat kerja yang menurun juga merupakan masalah yang dihadapi penerapan sistem *welfare state*. Mereka malas karena semuanya telah dijamin oleh pemerintah.

Analoginya adalah jika bekerja, pasti dikenakan pajak. Jika tidak bekerja, tidak akan terkena pajak dan mendapat subsidi. Sementara itu, jaminan sosial yang diberikan sama antara si kaya dan si miskin. aDisisi lain, Negara-negara Skandinavia ini belum mau bergabung dengan Persatuan

²⁹ Analisis mengenai konsep welfare state, diakses pada tanggal 22 Mei 2011 dari <http://map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>

Moneter Eropa (PME). Dikhawatirkan jika mereka bergabung akan dipaksa melakukan harmonisasi pajak seperti pajak pendapatan, bea masuk, dan PPN lainnya.

E. Konsep Welfare State Gandhi

Mahatma Gandhi memang lebih terkenal dengan pesan-pesannya tentang perdamaian, anti kekerasan, dan kasih sayang sesama manusia. Namun ternyata, dalam mewujudkan perdamaian Gandhi juga menempuh jalan-jalan yang didalamnya terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat, politik, ekonomi, serta sosial budaya.

Gandhi dalam konsep-konsepnya tentang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Gandhi mencampurkan unsure-unsur manusiawi sehingga menjadikan konsep-konsep tersebut fleksibel dan mampu diterapkan dengan cara yang gampang. Bukan hanya itu, filosofi-filosofi yang dikemukakan Gandhi lebih bersifat spiritualis dan humanis, sehingga kepentingan manusia secara keseluruhan menjadi pertimbangan utama Gandhi dalam mengutarakan ide-idenya.

Berbeda halnya dengan pakar-pakar politik dan ekonomi lain yang lebih cenderung membahas persoalan ini dengan pendekatan strukturalis. Seperti halnya konsep tentang satyagraha, yang mempunyai arti perlawanan

pasif, ataupun nir-kekerasan, dan juga berpegang teguh pada kebenaran yang mampu diterapkan dalam aspek politik dan ekonomi sehari-hari.³⁰

Setelah mengalami beberapa fase dalam mencari kebenaran, mulai dari belajar di Inggris, lalu ke Afrika Selatan, dan kembali lagi ke India, Gandhi mengumpulkan semua pengalaman yang Ia alami dan mencapai sebuah kesimpulan tentang kesejahteraan.

Ketika Gandhi belajar di Inggris, Ia menemukan study tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang kala itu pertama kali dibuat undang-undangnya di Inggris. Namun konsep Negara Kesejahteraan yang dibangun Gandhi bukan hanya sebatas pemenuhan materi di dalam sebuah Negara, tetapi juga bagaimana menciptakan sebuah konsep tentang perpaduan antara materi dan spiritualitas dimana manusia dijadikan pertimbangan utama. Melalui beberapa tahapan perubahan, Gandhi mulai merangkai ulang konsep *welfare state* yang ada di Inggris, dan menyesuaikannya dengan masyarakat yang ada di India saat itu. Adapun beberapa hal dari syarat-syarat terciptanya *welfare state* yang dikonversi oleh Gandhi dan disesuaikan dengan keadaan di India dapat dilihat di tabel 1.1.

³⁰ M.K. Gandhi, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*, Penerbit Narasi, Terj. Andi Tenri W, 2009, Hal 461-462

Tabel 1.1

NO.	WELFARE STATE	PERUBAHAN TERHADAP WELFARE STATE OLEH GANDHI
1	Sistem perpajakan yang ketat dan pemungutan pajak yang tinggi. Ketika pertama kali Welfare State dimuat dalam Undang-Undang Inggris pada tahun 1906, tarif pajak yang dipungut bagi kaum borjuis sangat tinggi. Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang di negara-negara Eropa macam Swedia, Jerman, Finlandia, dan Luxemburg. Dan pengaruh <i>tax sistem</i> seperti ini sangat berpengaruh terhadap semangat kerja warga negara yang menurun.	Pada dasarnya pemungutan pajak relatif dan sesuai dengan keadaan negara. Gandhi sadar, jika membuat sistem perpajakan yang ketat dan membuat tarif yang tinggi sangatlah tidak mungkin di India. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi rakyat India yang saat itu rendah dan tingkat konsumsi yang rendah sampai dengan saat ini. Ia mengubahnya melalui pengkampanyean <i>satyagraha</i> yang menekankan aspek moralitas individu untuk saling membantu. Dengan harapan yang kaya akan membantu yang miskin. Disisi lain, dalam kampanyenya, ia menegaskan bahwa rakyat India harus mau dan mampu untuk bekerja keras menghidupi diri sendiri.
2	Banyaknya Usaha Kecil Menengah akan mengurangi tingkat kesejahteraan merupakan syarat lain untuk mewujudkan <i>Welfare State</i> . Hal ini dikarenakan pungutan pajak yang tinggi, sehingga jika terdapat banyak UKM, maka akan terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin.	Gandhi juga tidak mungkin menerapkan poin ini di India. Pasalnya, lebih dari setengah penduduk di India bekerja sebagai petani dan juga Usaha kecil Menengah. Sebagai gantinya, Gandhi mengurangi tingkat konsumsi masyarakat yang berlebihan dengan cara <i>swadeshi</i> , yaitu memproduksi dan memakai produk sendiri.
3	Masyarakat yang homogen. Salah satu syarat terjadinya welfare state adalah masyarakat yang homogen, atau setidaknya suku yang ada di suatu negara tersebut sedikit dan penyebarannya tertata sesuai wilayah. Hal ini diharuskan untuk menghindari konflik kesukuan dan agama agar mampu memberikan jaminan keamanan bagi warga.	Tidak mungkin menerapkan masyarakat yang homogen di India. Selain keberadaan agama muslim sebagai agama minoritas disana, sistem kasta dalam agama hindu juga rawan menimbulkan konflik dan SARA. Oleh karena itu, Gandhi melalui pidatonya tentang <i>satyagraha</i> , dan melalui sistem demokrasi <i>sarvodaya</i> yang menyerukan untuk saling menghormati satu sama lain. India saat ini meski tidak secara keseluruhan, telah mampu untuk mengurangi konflik-konflik tersebut.

Di dalam gagasannya ini, Gandhi juga mengutarakan bahwasanya, Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa urusan manusia harus dikelola berdasarkan material, atau untung dan rugi. Oleh karena itu manusia harus membuang jauh-jauh pikiran semacam itu, agar bisa terhindar dari pemanfaatan dan meninggalkan pertimbangan moral.³¹ Karena pertimbangan moral akan menciptakan kerukunan dan perdamaian.

Gandhi juga tidak menafikkan bahwasanya materi merupakan unsur penting di dalam kehidupan manusia. Di dalam konsepnya tentang kesejahteraan, Gandhi menggambarkan bahwasanya tidak perlu ada garis control yang absolut di dalam aspek ekonomi manusia.

Malah Gandhi menyatakan bahwa keadilan adalah dimana semua orang dibebaskan mengeluarkan semua potensinya dan berhak untuk lebih maju dari yang lain jika dia benar-benar berusaha. Namun letak perbedaannya dengan konsep lain tentang ekonomi seperti Neo-Liberalisme adalah adanya aspek moral yang nantinya membuat si pemilik potensi ini kembali ke bawah dan membantu yang lemah dan bukan menjajah.

Di dalam konsepnya tentang membangun sebuah *welfare state*, Gandhi juga menegaskan bahwasanya aspek moral harus berada di atas aspek materiil. Bagi Gandhi, kesejahteraan tidak mungkin bisa dicapai jika ekonomi bertentangan dengan moral. Karena jika hal itu terjadi, maka kegiatan ekonomi yang akan berlangsung hanya akan menguntungkan sebagian orang

³¹ *Op-cit, Allapat*, Hal 50-51

saja yang mementingkan ego dan kepentingannya, dan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin melebar.

Hal ini akan berimbas kepada sistem negara yang nantinya juga hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja yang mempunyai kuasa karena memiliki uang.

Oleh karena itu, untuk menuju kepada keinginannya menciptakan sistem kesejahteraan yang baik, Gandhi mengemukakan konsep yang bernama *satyagraha* yang mempunyai makna anti kekerasan, eksploitasi, dan berpegang kepada kebenaran.³² Konsep ini dibuat sedemikian rupa agar mampu menjadi pijakan dalam melakukan kegiatan politis, sosial dan juga ekonomi yang berdasarkan Ahimsa yang mempunyai makna tidak menyerang, menyakiti, dan membunuh yang merupakan prinsip agama Hindu klasik .

Gandhi menginginkan kebenaran dan kejujuran menjadi landasan dasar manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi tidak ada eksploitasi oleh si kaya terhadap si miskin namun justru si kaya membantu si miskin. Sehingga kehidupan dalam bermasyarakat dapat berjalan harmonis dan adil.

Dalam perjalanannya Gandhi juga mulai terfikir tentang kekurangan konsep *satyagraha* dalam menjalankan kesejahteraan. Seperti kelemahan *welfare state* modern yang telah penulis kemukakan diatas, kekhawatiran akan menurunnya semangat kerja juga menjadi pertimbangan gerakan *satyagraha* Gandhi saat itu.

³² *Ibid*, Hal 49-50

Karena selalu diberi oleh yang lebih mampu seperti negara dan orang kaya yang berkewajiban untuk memberi, sehingga mengakibatkan si miskin hanya diam dan tidak bekerja, juga menjadi kelemahan *satyagraha* saat itu. Gandhi yang lama melintang di dalam perjuangan di Afrika Selatan, lalu berlanjut ke India menyadari sesuatu yang penting. Ketika Gandhi memperjuangkan hak-hak masyarakat India di Afrika Selatan, beberapa dari teman-teman

Gandhi merasa hak mereka diatas segalanya sehingga melupakan kewajiban mereka seperti beribadah dan bekerja. Dari situ lah Gandhi menyadari pentingnya kewajiban untuk dijalankan.

Maka Gandhi mengatakan bahwasanya kewajiban harus didahulukan dibandingkan hak. Karena jika sudah menunaikan kewajiban, maka hak pun akan datang dengan sendirinya karena sudah merupakan kepastian.³³ Dan hal ini Gandhi wujudkan dalam konsep yang ia sebut *sarvodaya* yang juga menjadi bagian dari gerakan *satyagraha*.

Konsep *sarvodaya* sendiri memiliki arti tatanan sosial yang berdasarkan kasih sayang dan saling pengertian. Dalam konsep ini, Gandhi coba menjelaskan tentang bagaimana manusia bisa hidup secara berdampingan dan bukan malah saling menyakiti dan mengeksploitasi.

Sarvodaya menjelaskan bahwasanya semua manusia itu mempunyai kewajiban dan hak yang sama yang disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Kewajiban seorang manusia adalah untuk saling membantu sesuai

³³ *Ibid*, Hal 51.

kemampuan dan hak seorang manusia adalah untuk menggali potensinya dan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan.

Kesinambungan dan timbal balik seperti ini merupakan tujuan Gandhi di dalam membentuk sebuah pemerintahan yang baik yang sering juga menjadi seruan kampanye-kampanye Gandhi dalam perjuangannya mencapai kesejahteraan India yang saat itu dijajah Inggris.

Aspek moral tetap menjadi dasar penting dalam konsep ini. Perlawanan terhadap oknum-oknum yang ingin eksploitasi harus dilawan dengan non-kekerasan dan harus menggugah si pengeksploitasi agar mau dengan sendirinya mau mengurungkan niatnya dalam menindas.

Tatanan sosial yang berdasarkan saling pengertian dan tidak saling menindas akan menumbuhkan sikap moral yang baik sehingga menciptakan sebuah sikap timbal balik yang baik antara elite yang berkuasa dengan masyarakatnya.³⁴

Elite melakukan kewajibannya dalam mengemban tugas melayani warganya, dan mendapatkan hak mereka sebagai orang yang dihormati dan disegani warganya. Sementara masyarakat berkewajiban untuk berbakti pada negara dan mengkritik serta memperbaiki perilaku elite yang kurang baik sehingga mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh rakyatnya.

³⁴ *Ibid*, Hal 52-53

Dengan begitu, rakyat mendapatkan hak untuk dilayani oleh pemerintah dan mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan seperti ini sangat sulit untuk dicapai jika orang-orang yang berkuasa tetap bersikukuh mempertahankan egonya dan tetap ingin memenagkan kepentingannya dan kelompoknya. Menurut Gandhi, niatan yang baik akan rusak jika pelakunya tidak baik, atau ditengah jalan membelot dan memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan sendiri. Maka dari itu, Gandhi menyinggung tentang pentingnya keterkaitan antara metode dan tujuan.

Gandhi sangat tidak sepatat dalam teori yang menyebutkan bahwasanya segala cara dihalalkan demi mencapai tujuan. Gandhi bersikukuh jika metode atau cara merupakan point paling penting dalam mencapai tujuan. Ia menyatakan bahwa metode itu seperti biji, dan tujuan adalah buahnya.

Jika bijinya tidak baik, maka buahnya pun akan busuk dan tidak seperti yang diharapkan.³⁵ Sulit memang menggunakan metode-metode Gandhi yang berbasiskan kasih sayang dan moralitas.

Kesulitan metode ini juga didorong oleh keinginan masyarakat akan hasil yang instant dan bisa langsung dilihat buahnya. Bagi Gandhi proses tetap menjadi hal yang utama jika ingin mencapai tujuan yang sempurna. Momentum untuk menunjukkan bahwasanya pentingnya filosofi-filosofi *satyagraha*, *sarvodaya*, dan *ahimsa*, Gandhi tunjukkan ketika

³⁵ *Ibid*, Hal 53.

memperjuangkan petani melawan para tuan tanah dan pengeksploitasi di berbagai daerah di India serta mempopulerkannya melalui berbagai tulisan dan pidato-pidato di muka umum.

Setelah itu Gandhi mendengungkan semangat *satyagraha* dan menyerukan perlawanan terhadap penindasan Inggris terhadap India. Pada tahun 1920, Gandhi menjadi figur penting di kancah perpolitikan India. Melalui Indian Nasional Congress (INC).

Gandhi bersama rakyat India lain melakukan perlawanan yang tanpa kekerasan terhadap Inggris dengan cara memboikot terhadap seluruh produksi barang dan jasa serta institusi-institusi yang diperuntukkan bagi orang Inggris. Pada masa perlawanan yang tanpa kekerasan itu lahirlah konsep bernama *swadeshi*, yang mempunyai arti memakai produk sendiri. Di masa itu, kapas yang diekspor ke Inggris sebagai bahan baku tekstil diboikot dan dijadikan bahan baku baju tradisional India yang disebut sebagai *Khadi* yang dibuat dengan roda pemintal yang juga sering disebut *Chakra*. Dan ternyata hal ini benar-benar menyulitkan Inggris karena tidak mampu memproduksi secara maksimal tanpa ada kapas dari India.³⁶

Ekonomi swadeshi dianggap Gandhi sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan di muka bumi India. Namun Gandhi bukannya anti mesin-mesin pabrik. Gandhi selalu berkata, jika mesin pabrik itu memang berguna dan mampu membuat warga India mendapat pekerjaan, maka tidak

³⁶ *Ibid.* Hal 19.

ada salahnya mereka ada di India. Tapi dengan syarat keadilan harus ditegakkan antara si pemilik pabrik dengan buruh-buruh India.

Namun sebelum Gandhi sempat melihat semua keseluruhan perjuangannya ini. Gandhi wafat pada tahun 1948, dibunuh oleh seorang Hindu fanatik karena Gandhi dianggap terlalu memihak Islam yang saat itu diperjuangkan Gandhi untuk mendapatkan kursi yang sama di pemerintahan.³⁷

Gandhi telah meninggalkan dunia ini sebelum India memulai perjuangannya pasca kemerdekaannya tahun 1947. Namun ajaran-ajarannya masih tetap melekat di kalangan masyarakat India sampai dengan saat ini.

³⁷ M.K. Gandhi, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*, Penerbit Narasi, Terj. Andi Tenri W, 2009.

BAB III
PROSES REAKTUALISASI KONSEP WELFARE STATE
MAHATMA GANDHI DI INDIA

Tidak ada negara yang akan maju tanpa memiliki kebijakan yang benar - benar menghasilkan. India sendiri menempuh waktu yang sangat lama dalam memperbaiki tatanan sistem mereka sehingga menjadi lebih baik seperti saat ini. Pencarian terhadap efektifitas kebijakan dilakukan melalui jatuh bangun yang cukup parah. Berbagai perang dan kelaparan missal yang terjadi selama bertahun - tahun dialami masyarakat serta seluruh negeri di India. Dalam perjalanannya, halangan dan rintangan itu India lewati satu per satu dengan sabar dan tidak menggebu-gebu dalam bertindak. Pengambilan kebijakan -kebijakan yang diambil pun harus ditimbang secara matang agar nantinya tidak merugikan rakyat mereka. Hal ini dikarenakan India dulu merupakan Negara miskin dan hampir seluruh rakyatnya merupakan petani dan pengusaha industry rumahan. Masuknya Neo - Liberalisme di India melalui investasi-investasi modal asing juga sangat diwaspadai oleh India dan dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Melalui metode-metode sederhana inilah India mulai bangkit secara perlahan tapi pasti untuk kembali membangun negaranya.

Hal ini tidak lepas dari peran nilai-nilai yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi seperti *satyagraha*, *swadeshi*, dan nir-kekerasan, sebagai pertimbangan bagi elite-elite pemerintahan India dalam mengambil sebuah keputusan. Momentum yang pas, tidak terburu-buru, serta pengamalan humanisme ala

Gandhi di India, merupakan kunci sukses India untuk kembali merebut kejayaannya.

A. Ekonomi Repelita Model Nehru

Jawaharlal Nehru merupakan Perdana Menteri pertama India yang terpilih melalui partai kongres India (Indian National Congress) bentukan Mahatma Gandhi. Sepeninggal Gandhi yang terbunuh di tahun 1948 oleh seorang Hindu fanatik, Nehru memangku jabatan sebagai ketua partai kongres India serta Perdana Menteri selama kurang lebih 44 tahun.

Pasca meninggalnya Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India pertama yaitu Jawaharlal Nehru memulai rancangan ekonominya dengan sistem ekonomi terencana atau repelita (rencana pembangunan lima tahun). Model ini menganut sistem yang juga dipakai oleh Uni Soviet dibawah Joseph Stalin yang sangat dikaguminya yang dikombinasikan dengan semangat *swadeshi* yang digagas Gandhi.

Nehru yang kala itu trauma dengan penjajahan Inggris lebih memilih untuk menutup India dari campur tangan bangsa asing. Nehru tetap bersikukuh jika ekonomi harus diatur oleh pemerintah. Karena Nehru juga sempat beberapa kali ditahan oleh Inggris karena aktivitas kemerdekaannya, maka ia juga membangun sebuah pemikiran bahwasanya ekonomi-politik harus berdasarkan asas kesejahteraan dan juga kesetaraan.

Selama periode itu, perekonomian India mengandalkan perusahaan milik negara. Sektor swasta diikutkan, namun dikontrol ketat lewat regulasi

pemerintah.³⁸ Selama berkuasa, model ekonomi yang diterapkan oleh Nehru banyak menuai kritikan.

Beberapa diantaranya adalah permasalahan birokrasi seperti pejabat yang mempersulit proses perizinan serta pilih kasih. Hal ini membuat ekonomi terlantar, dan taruhannya adalah jutaan warga di India. Selain itu, kritikan datang dari para pakar ekonomi di India. Mereka menganggap bahwa sistem yang dipakai Nehru tidak efektif dan hanya mematikan potensi manusianya dalam membuat inovasi di bidang perdagangan.

Pada akhirnya, banyak talenta-talenta India yang berhamburan ke luar negeri, karena menganggap tidak adanya kebebasan berekspresi di India. Secara umum, perekonomian India saat itu tetap menanjak walaupun secara perlahan. Namun dikarenakan banyaknya bencana seperti kelaparan misal dan terlalu tertutupnya negara akan investasi asing, maka pertumbuhan perekonomian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harapan sebenarnya dari model ekonomi Nehru ini adalah menjadikan India sebagai negara Industri yang maju dan mengalahkan negara-negara lain dan juga membuat pola industri substitusi impor.

Namun masalahnya terletak pada strategi yang diterapkan Nehru. Nehru terlalu menggebu-gebu dalam perlawanannya terhadap peranan asing. Keinginan dalam melawan kolonialis dan semangat *swadeshi* lebih banyak mempengaruhi pola ekonomi Nehru saat itu. *Swadeshi*, terutama, terlalu dimaknai sebagai ideologian yang menentang peranan asing oleh Nehru. Hal

³⁸ Irwan Suhandi, *India Bangkitnya Raksasa Baru Asia (Calon Pemain di Era Globalisasi)*, Penerbit Kompas, Thn 2007, Jakarta, hal 11

ini karena *swadeshi* yang diterapkan Nehru dilengkapi oleh semangat sosialis Fabian³⁹ yang sangat menentang perdagangan bebas dan proteksionisme.

Padahal Gandhi menafsirkan *Swadeshi* sebagai perlawanan ekonomi tanpa kekerasan yang juga memperbolehkan peranan asing selagi mampu mensejahterakan rakyat India. *Swadeshi* yang dimaksudkan Gandhi sangat jauh dengan apa yang ditafsirkan oleh Nehru. *Swadeshi* yang dikonsepsikan Gandhi adalah bagaimana warga India saat itu mampu berdiri sendiri dan terlepas dari keegoisan dan nasionalisme yang eksklusif.

Semangat ini hanya ditujukan untuk kebangkitan bangsa India agar bisa mandiri dan bertumpu pada kakinya sendiri jika nanti ingin mencapai cita-citanya sebagai negara yang makmur. Namun bukan berarti Gandhi anti Industrialisasi. Dalam beberapa pidatonya dalam klarifikasinya atas kritikan anti mesin, Gandhi hanya menyatakan penyesalannya atas penyalahgunaan mesin-mesin itu demi eksploitasi.⁴⁰ Selain itu Gandhi justru sangat menghargai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

³⁹ *Ibid*, Jakarta, hal 11

⁴⁰ *Op-cit*, Allapat, Hal 115-117

B. Imf, Perang Irak, dan Reformasi Ekonomi Tahun 1991

Setelah kurang lebih 44 tahun berada di dalam sistem ekonomi ala Nehru, dengan berbagai kegagalannya, para ekonom serta elite -elite di India mencoba untuk mengubah tatanan sistem ekonomi India kearah yang lebih maju, yaitu dengan sedikit sentuhan Liberalisasi. Adalah IG Patel dan Manmohan Singh yang menjadi motor utama perubahan ekonomi India atas keinginan Indira Gandhi, dilanjutkan Narashima Rao, dan Rajiv Gandhi. Perubahan drastis sangat terlihat pada masa pemerintahan Narashima Rao. Sungguh aneh memang jika mengetahui bahwa India ternyata mendapat keuntungan dari International Monetary Fund (IMF), dan juga perang Irak pertama yang saat itu menaikkan harga minyak.

Awal mulanya adalah ketika di tahun 1980-an, Indira Gandhi yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) merasa harus ada perombakan sistem ekonomi. Yang menjadi salah satu pemicu utamanya adalah keadaan politik saat itu yang memunculkan kelompok bernama Janta. Kelompok ini menolak keras sistem ekonomi ala Nehru dan menginginkan perubahan ekonomi secara radikal di India.

Kelompok ini juga ingin adanya mobilisasi sumber daya alam, dan peningkatan kesempatan kerja. Dikarenakan harga minyak yang melonjak secara tiba-tiba di tahun 1982, Indira akhirnya meminjam dari IMF. Kala kebijakan anak Mahatma Gandhi itu dikecam keras oleh sebagian besar masyarakat India meskipun pada akhirnya mampu mengembalikan utangnya

tersebut. Latar belakang peminjaman tersebut adalah kebutuhan mendesak akan Investasi.

Selama ini, sumber investasi di India sangat tergantung pada tabungan swasta. Namun saat itu tabungan swasta sudah penuh, dan perekonomian tak kunjung mengalami peningkatan. Setelah itu, anak dari Indira Gandhi yang menggantikannya sebagai PM yaitu Rajiv Gandhi, ingin lagi mendapatkan pinjaman dari IMF dan organisasi lainnya.

Namun syarat mendapatkan pinjaman tersebut semakin membuat masyarakat India yang mendukung model Nehru semakin berang. Pasalnya India diharuskan untuk memperlonggar ekspansi usaha swasta, pengurangan pajak perusahaan, serta control terhadap harga-harga dikurangi. Tetapi, karena banyaknya penolakan, lagi-lagi reformasi ekonomi gagal dan dana tersebut malah banyak dialokasikan untuk perusahaan milik negara. Derap reformasi ekonomi saat itu masih sangat sulit untuk diwujudkan.

Terlebih lagi banyak penolakan dari kalangan serikat buruh dan petani yang merasa akan menjadi korban jika hal itu terjadi. Isu-isu reformasi ekonomi menjadi isu yang sangat sensitif saat itu. Bahkan belum ada yang berani secara terang-terangan dan tegas menggelontorkan isu ini karena pemerintah takut kehilangan popularitas di hadapan warganya. Isu reformasi ekonomi juga hanya sebatas wacana umum dan tidak berani diseriuskan.

Reformasi berjalan secara perlahan namun pasti. Modernisasi akhirnya menyebabkan defisit dan penumpukan hutang. Sementara itu hasilnya belum dapat dilihat. Pertumbuhan ekonomi tetap rendah dan rangsangan ekonomi

belum menggelegar.⁴¹ Pada periode 1989-1991 kegagalan ekonomi semakin menganga diiringi dengan kekacauan politik berlangsung.

Program lewat rancangan repelita tidak berjalan dengan sempurna. Masalah muncul ketika Irak menginvasi Kuwait tahun 1990. Banyak pekerja India di Teluk Persia kehilangan pekerjaannya dan kembali ke India. Hal itu tentu menurunkan devisa yang menjadi andalan penerimaan devisa negara.

Masalah itu dipreburuk lagi dengan konflik domestik yang terjadi di Ayodhya antara Islam dan Hindu. Pemerintah pusat yang dikomandoi V.P. Singh yang jatuh di tahun 1990 menyebabkan terjadinya krisis neraca pembayaran di tahun itu.

Cadangan devisa untuk kebutuhan impor hanya bertahan sampai dua minggu. Lagi-lagi warga miskin menjadi korban karena pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakatnya dengan harga subsidi. Pemerintahan lalu jatuh di tangan Chandra S. Singh di periode 10 November 1990 sampai dengan 21 Juni 1991.

Namun masalah juga tidak bisa terpecahkan begitu saja. Dan bahkan perekonomian semakin memburuk. Lagi-lagi India memerlukan bantuan asing untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Akhirnya India harus menyetujui perjanjian percepatan Liberalisasi ekonomi dengan IMF dan organisasi Internasional lainnya. Regulasi pemerintah dikurangi, terutama perdagangan Internasional.

⁴¹ *Op-cit*, Suhandi, Jakarta, hal xvii

Kontrol terhadap sektor-sektor swasta diperlonggar dan monopoli terhadap bidang-bidang tertentu dihapuskan, seperti transportasi, dan beberapa sektor perekonomian.⁴² Secara umum ekonomi India menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing karena pengurangan control tarif yang diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk meraih angka pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi. Disisi lain juga untuk memajukan teknologi yang pada masa itu masih sangat kurang di India. Kekuasaan penuh dalam menjalankan roda perekonomian juga diberikan kepada pemerintahan Negara Bagian. Jadi masing-masing Negara Bagian mempunyai gayanya tersendiri dalam menjalankan ekonomi.

Namun kebebasan itu justru bukan lantas menjadikan Negara India sepenuhnya menganut sistem pasar bebas meskipun begitu kelihatannya. Perekonomian India dibangun dengan tatanan moral dan budaya yang kuat. Sehingga Investasi yang masuk ke India juga disaring dan hanya boleh masuk jika memiliki manfaat. Warga India semuanya adalah pekerja keras yang tidak pandang bulu apakah gajinya kecil atau besar. Disisi lain, para pendukung sistem Nehru di India juga menjadi faktor penting penyaring masuknya peranan asing di dalam Negara India.

Oleh karena itu kemajemukan itu, membuat pemerintah tetap berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tentang masuknya investasi asing di India. Pertanian dan Industri Kecil yang menjadi pekerjaan rakyat India pada umumnya, tidak boleh begitu saja diabaikan oleh pemerintah. Gandhi juga

⁴² Ekonomi India, diakses pada tanggal 20 April 2011, dari <http://www.anneahira.com/ekonomi-india.htm>.

pernah mengatakan bahwasanya dalam prinsip Nir-kekerasan dan dalam menciptakan harmoni, haruslah ada keseimbangan antara pemikiran struktural dengan moral. Dengan begitu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diselewengkan dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.

C. Kekuatan Industri Informasi Teknologi Didukung Kebijakan “Brain Gain”

Melihat perkembangan teknologi Amerika Serikat di tahun 1940-an yang dianggap memiliki potensi ekonomi di masa depan, pada tahun 1990-an India pun memulai gerilyanya di bidang IT. Saat ini industri di bidang IT sedang menjadi primadona di Negara India. Dilihat dari pendapatan ekspornya, industry IT tercatat sebagai yang terbesar sejak tahun 1990-an sampai dengan saat ini.

Menurut penelitian yang dibuat oleh Nasscom (National Association Software and Service Company), pendapatan ekspor antara kurun waktu 2005-2006 mencapai 100.000 crore rupee atau setara dengan 22.43 Milliar Dollar Amerika Serikat. Dan mungkin akan mengalami peningkatan menjadi 25 Milliar Dollar AS pada tahun 2010.⁴³ Industri IT ini melibatkan sekitar 1 juta tenaga kerja langsung, dan 3 juta tenaga kerja tidak langsung.

Dalam membangun industrinya ini, India memulainya dari pemantapan di dunia pendidikan dan juga pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mempelajari IT yang saat itu berbasis di Amerika Serikat, India

⁴³ *Ibid*, Jakarta, hal 36

mengirimkan pemuda-pemudanya belajar dan berguru di negeri Paman Sam tersebut.

Setelah menyelesaikan tugasnya belajar, mereka direkrut untuk bekerja disana terutama di lembah silikon. Tenaga kerja India memang banyak dipakai disana. Hal ini dikarenakan selain pintar berbahasa Inggris, upah mereka juga tergolong murah⁴⁴. Di lembah silikon di San Fransisco misalnya, dari 150.000 tenaga kerja, 60.000 diantaranya adalah warga India.

SDM India di Amerika Serikat mempunyai andil besar dalam perkembangan teknologi disana. Kenyataan ini membuat Narashima Rao yang saat itu menjabat sebagai PM India, tertarik untuk membawa pulang tenaga - tenaga kerja ini pulang ke negara asalnya dan membangun industri IT di India.

Sebagai kiat mengembalikan tenaga-tenaga kerja India itu ke negeri asalnya. Dikeluarkanlah kebijakan pemberian intensif dan suasana kondusif.⁴⁵ Karena saat itu India belum mempunyai modal yang besar, maka untuk menggalang modal, dibukalah pintu seluas-luasnya untuk investasi asing.

Dengan menawarkan berbagai kemudahan seperti penghapusan pajak bagi barang modal untuk industry ini serta menghapus monopoli di bidang layanan internet. Sedangkan intensifnya adalah karyawan TI ini mendapatkan kepemilikan saham di perusahaan tempatnya nanti bekerja.

Hasil dari kebijakan ini adalah berubahnya *Brain Drain* menjadi *Brain Gain*. Diprakarsai oleh tenaga-tenaga ahli yang dulu pernah bekerja di

⁴⁴ *Ibid*, hal 35

⁴⁵ *Ibid*, Jakarta, hal 37

Amerika Serikat, hampir semua Negara Bagian di India mempunyai stasiun bumi untuk jaringan komunikasi data.

Sejak tahun 1996, pemerintah pusat memainkan peran yang sangat proaktif di bidang industri IT ini. Lalu diikuti oleh banyak Negara Bagian yang juga mengeluarkan kebijakannya. Dengan lembah-lembah silikonnya produksi peranti lunak dan komputer saat ini menjadi yang nomor satu di dunia. Hal yang serupa pernah dilakukan Gandhi ketika mempopulerkan produk dalam negeri sendiri yaitu *Khadi*.

Saat itu Gandhi dianggap anti industrialisasi, namun ia menjawab, bahwasanya penting bagi India untuk memanfaatkan potensi rakyatnya agar bisa mandiri, dan bukan berarti India tidak mau menerima produksi asing secara menyeluruh. Justru ia menegaskan, jika ada sebuah barang produksi yang belum dapat diproduksi sendiri oleh India dan hanya bisa diproduksi oleh asing, maka India wajib belajar dari mereka⁴⁶. Lalu menerapkannya di India demi kepentingan seluruh rakyat di India. Kebijakan Rao ini diadopsi melalui pemikiran Gandhi, namun dengan cara yang lebih modern.

⁴⁶ *Op-cit, Allapat*, Hal 115-117

D. Kebijakan Proteksi Terhadap Usaha Kecil Menengah

Gandhi, di dalam konsep *swadeshi* yang dikemukakannya, pernah melakukan pidato yang mengatakan bahwa, India tidak terdiri dari beberapa kota, tetapi terdiri atas ratusan ribu desa.⁴⁷ Gandhi di dalam pidatonya tersebut mengajak masyarakat untuk kembali membangun kekuatan-kekuatan industri kecil di pedesaan agar mampu menghapus ketergantungan kronis industri pedesaan ini terhadap pasokan dari kota.

Terutama untuk kebutuhan pokok. Gandhi selalu mencari cara agar bagaimana industri desa ini mampu bergerak maju untuk bisa setidaknya menafkahi diri mereka sendiri. Karena memang pada masa Gandhi dulu, industri pedesaan memang menjadi produsen terbesar, namun bukan pedagang terbesarnya. Mereka harus mensuplai kebutuhan sehari-hari melalui kota, dan itu sangat memberatkan. Karena mereka terpaksa menjual produknya kepada orang yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari produk mentah itu. Lalu menjualnya kembali ke orang desa.⁴⁸

Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu mengolah produk yang mereka hasilkan tersebut. Sampai pada akhirnya Gandhi memperjuangkan *Khadi* yang dibuat oleh orang desa asli dan diperdagangkan dengan harga yang relative murah.

Dari sini, harapan Gandhi adalah industri pedesaan ini mampu bertahan hidup dari apa yang mereka buat dan menghilangkan ketergantungan terhadap kota. India masa kini memang tidak lagi mengenal Industri Pedesaan.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 109

⁴⁸ *Ibid*, Hal 110

Namanya berubah menjadi Usaha Kecil. Namun tempatnya tetaplah di pedesaan dan di pinggir-pinggir kota.

Di tengah dominasi perusahaan-perusahaan besar dan ditambah lagi dengan masuknya investor-investor asing melalui sistem pasar bebas, Usaha Kecil (UK) di India masih menjadi penyumbang 40 persen nilai tambah kotor industry dan 40-45 persen ekspor.⁴⁹

Mungkin di dalam sistem pasar bebas yang dianut dunia saat ini, UK hanya akan menjadi bulan-bulanan usaha besar dan akhirnya hanya akan memperkebar jarak antara si kaya dan si miskin. Namun di India semua itu dimentahkan begitu saja. Karena ternyata UK masih hidup dari mulai masa Gandhi sampai dengan sekarang. Jumlah UK di India saat ini mencapai sekitar 4 juta unit yang menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak yaitu sekitar 18 juta orang, kedua setelah pertanian.⁵⁰ Kiat-kiat India dalam melindungi UK dari persaingan juga dibentuk dalam sebuah paket kebijakan yang pada intinya mencadangkan subsektor industri tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh UK.

Pada tahun 2005, ada sekitar 506 jenis produk yang dicadangkan diantaranya kertas, makanan, bahan-bahann baku transportasi, plastik, kimia, rekayasa mesin, elektronik dan banyak lainnya.

Banyak kebijakan yang mendorong UK, meski tidak semuanya menyentuh karena jumlahnya yang sangat banyak. Sekitar 97 persen UK di India tidak lagi tergantung pada perbankan untuk modal kerja.

⁴⁹ *Op-cit, Suhandu*, hal 131-132

⁵⁰ *Ibid*, hal 133

Hal ini diberlakukan untuk menyeimbangkan antara subsidi yang mereka terima dengan keinginan mereka untuk berusaha menghidupi dirinya. Jadi memang Bank sendiri tidak mau memberikan pinjaman kepada mereka.

Namun sepertinya kebijakan ini agak berlebihan karena pada akhirnya beberapa dari mereka terpaksa ke rentenir walaupun tidak secara keseluruhan. Kemiskinan, kelaparan massal, dan daerah-daerah kumuh yang selama ini identik dengan Negara India, dianggap merupakan dari kegagalan ekonomi pedesaan yang dahulu diterapkan Gandhi.

Sistem perekonomian desa dianggap tidak akan mampu bertahan lama dalam ruang lingkup pasar bebas karena keterbatasan dan ketidakterbukaan mereka terhadap pihak asing. Namun di India saat ini telah membuktikan bahwasanya UK sebagai transformasi unit desa ala Gandhi masih mampu bertahan dan bahkan menjadi penopang ekonomi India dengan keadaan di era Globalisasi saat ini yang menganut sistem pasar bebas.

Karena luas negara dan jumlah penduduk yang banyak (sekitar 1,3 Milliar jiwa), wajar bila membutuhkan waktu untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan massal di India.

E. Program di India Berjalan Sesuai Dengan Tujuannya

Dalam ajaran *satyagraha* Gandhi, ia pernah mengatakan bahwa dalam menciptakan tujuan kesejahteraan, metode atau cara yang dipakai akan punya pengaruh besar terhadap tujuan yang ingin dicapai.⁵¹ Maka dalam mencapai tujuan yang mulia itu, membutuhkan proses yang mulia, serta dengan cara atau metode yang mulia pula.

Jika tujuannya mulia, namun dilakukan dengan menghalalkan segala cara, maka semulia apapun niatan dalam mencapai tujuan itu, akan berubah menjadi buruk ditengah jalan.

Di India masa kini konsep Gandhi tentang keterkaitan metode dan tujuan masih digunakan dalam pemutusan kebijakan serta pembuatan program India. Kemajuan di sektor Farmasi dan obat-obatan misalnya, tidak lepas dari tujuan untuk menyehatkan seluruh rakyat India dan bukan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Gandhi yang pernah belajar menjadi seorang perawat ketika sedang merawat pamannya yang sakit dan belajar tentang obat-obatan. Tujuannya memang hanya satu, yaitu untuk bisa membantu menyehatkan masyarakat.

Di India modern saat ini, industri farmasi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga hampir memasok 40 persen kebutuhan dunia akan obat-obatan dalam bentuk curah.⁵² India juga tidak hanya mengekspor obat-obatan ke negara maju seperti Prancis, Kanada, Jerman dll. Tetapi juga ke Amerika Latin, Asia, dan Afrika.

⁵¹ *Op-cit, Allapat*, Hal 53

⁵² *Op-cit, Suhandha*, hal 117

Pemberlakuan Undang-undang Paten pada tahun 1970, menjadi tonggak sejarah pengobatan di India. Semua berawal ketika India ingin melepaskan ketergantungan terhadap asing, sehingga mereka ingin melakukan swasembada di bidang obat-obatan, dan juga pertanian.

Hal ini ditujukan untuk menjadikan tenaga lokal India mampu mengelola serta mengembangkan teknologi mereka di bidang ini. Industri ini mengalami perkembangan pesat dari hanya sekedar pengolahan, menjadi produksi dengan didukung alat-alat teknologi yang canggih, dengan kontrol kualitas yang ketat. Industri farmasi India ini juga telah mendapatkan sertifikasi kelayakan dari berbagai badan Internasional yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan.

Di bidang pertanian India juga bergerak dengan lambat tapi pasti dalam menanggulangi kelaparan yang kerap kali terjadi di India. Permasalahan di sektor ini memang menjadi permasalahan yang paling sulit untuk diselesaikan. India terkenal dengan tragedi kelaparan massal yang kerap kali terjadi pada kurun waktu 1943-1950.

Orang-orang desa datang ke kota dan menyerbu makanan yang ada. Banyak juga dari mereka mati di jalanan karena mati kelaparan. Di India sendiri kelaparan bukan berarti kekurangan. Tetapi benar-benar tidak makan selama sehari-hari.

Disamping harga bahan mentah pokok yang dihargai sangat murah, mereka juga masih ditindas oleh para tuan tanah. Hal ini juga pernah terjadi di masa Gandhi. Ketika itu ia mengemukakan kebijakan untuk penghibaan tanah.

Namun kurang berhasil. Di tahun 1965, lahirlah Revolusi Hijau di India yang ditandai dengan mekanisasi pertanian serta penggunaan obat-obatan dan pupuk kimia secara intensif.

Izin pendirian pabrik pupuk dan obat-obatan dibuka, kanal-kanal dibangun untuk irigasi, menjamin harga pembelian untuk petani, membangun stok pangan dan juga menyebarkan informasi tentang pertanian. Hasilnya memang luar biasa. India mengalami swasembada yang sangat fantastis, yaitu menimbun stok pangan sebanyak 40 ton pada tahun 2000 dan menjadi eksportir terbesar beras kedua setelah Thailand. Negara yang digadang-gadang akan mengalami kelaparan massal pada tahun 1975 itu (karena mengimpor 10 juta ton gandum tahun 1966) berbalik menjadi salah satu eksportir terbesar pangan di dunia.⁵³ Namun memang tidak ada revolusi yang bertahan selamanya.

Saat ini India kembali impor karena mulai masuknya globalisasi dan perusahaan multinasional ke sektor ini. Bibit hasil rekayasa genetika yang mahal, iklim yang tidak menentu, serta mekanisme pasar yang tidak memihak kepada merupakan beberapa faktor yang membuat petani India kembali menderita.

Mereka terpaksa menanam tanaman yang komersial dan kehilangan sentuhan tradisionalnya⁵⁴. Namun India masih melakukan berbagai cara untuk mengentaskan agar tidak lagi terjadi kelaparan di Negara yang berpenduduk 1.3 juta jiwa tersebut. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan petani itu di forum WTO.

⁵³ *Ibid*, hal 136

⁵⁴ *Ibid*, hal 138

BAB IV
HASIL REAKTUALISASI KONSEP WELFARE STATE
MAHATMA GANDHI DI INDIA MASA KINI

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, negara manapun, dan bangsa apapun, termasuk Negara India. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dianalisa karena sudah membuktikan sedikit demi sedikit bahwasanya Globalisasi yang dianggap mampu untuk menciptakan kesejahteraan di dunia ini, ternyata hanya membuat jurang yang semakin lebar menuju kesejahteraan tersebut. Tidak semua negara siap dengan kedatangan era Globalisasi. Adanya persaingan ketat antar negara, membuat adanya persaingan untuk menjadi negara pemenang, atau hanya menjadi negara yang terjajah oleh si negara pemenang. Satu hal yang dapat dipelajari adalah, bahwasanya Globalisasi harus disaring sedemikian rupa, agar tidak tenggelam di dalam permainannya. Melalui liberalisasi ekonomi dengan skala Internasional atau yang sering kita sebut sebagai Neo-Liberalisme, walaupun berbeda diksi dengan Globalisasi, keduanya hadir dalam wajah yang sama dan menakut-nakuti seluruh rakyat di dunia ini.

India yang juga terkena pengaruh dari Globalisasi ini, mencoba untuk menyiasatinya dengan kacamata yang sangat hati-hati agar rakyatnya tidak terkena pengaruhnya. Atau setidaknya mampu menahan gelombang masuk terlalu dalam dan menghancurkan negara mereka. Selain itu, dunia Internasional, India juga mencoba untuk mencari sebuah solusi agar negara-negara

berkembang lainnya mampu menahan gelombang Globalisasi dan Neo - Liberalisme melalui berbagai forum Internasional dan kebijakan luar negeri.

A. India Di Pusaran Neo-Liberalisme

Saat ini Globalisasi telah menjadi kata yang sangat familiar dengan semua kalangan masyarakat dunia. Hampir semua kejadian di dunia ini mempunyai hubungan erat dengan Globalisasi. Bahkan dalam pidato -pidato para pejabat, kata Globalisasi pasti ada terselip di dalamnya. Buku -buku pelajaran, gaya hidup, sampai dengan kehidupan bermasyarakat, semuanya hampir bersentuhan langsung dengan yang namanya Globalisasi. Kesepakatan tentang arti sesungguhnya dari Globalisasi ini memang belum pasti. Ada yang mengatakan bahwa Globalisasi adalah pemadatan dunia, serta intensifikasi kesadaran dunia sebagai suatu kesuluruhan. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya Globalisasi adalah sebuah proses penyatuan secara menyeluruh, ataupun Global. Tapi yang pasti, inti dari semua definisi-definisi tersebut mengandung makna yang sama yaitu, Internasionalisasi, Liberalisasi, Universalisasi, dan Deteritorialisasi.⁵⁵ Internasionalisasi, karena kata “Global” menggambarkan hubungan lintas negara. Liberalisasi, karena di Era ini, integrasi ekonomi diberlakukan untuk menyatukan semua negara. Dari sini juga lahir sistem perdagangan bebas atau *Free Trade*.

Karena untuk menciptakan sebuah kesatuan ekonomi dunia, perdagangan bebas dianggap lebih efisien dibandingkan sistem proteksi.

⁵⁵ Nanang Pramuji Mugasejati dan Ucu Hartanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, Tn 2006, Hal 2-5

Univesialisasi, artinya, semua orang di dunia ini menikmati dan terkena dampak dari penyebaran barang dan ilmu pengetahuan. Westernisasi, bisa juga dibidang Modernisasi, dimana budaya barat dan Amerika telah menjadi budaya dunia. Deteritorialisasi, di artikan sebagai dimana batas-batas territorial tidak lagi menghalangi manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Demikian lah Globalisasi sebagai sebuah kesatuan yang kompleks dari semua proses yang ada di dunia ini, yang terkadang berjalan secara bertolak belakang dan bahkan terkadang saling bertentangan satu sama lain.

Globalisasi yang selalu dianggap dapat membawa kesejahteraan bagi dunia ternyata belum berdampak kepada sebagian besar masyarakat dunia. Parahnya lagi, Globalisasi malah semakin memperburuk keadaan. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Neo-Liberalisme yang menjadi sistem utama ekonomi dunia di Era Globalisasi ini merupakan salah satu biang keroknya. Para pendukung Neo-Liberalisme menganggap Globalisasi sebagai sebuah ladang basah yang mampu mensejahterakan rakyat dunia.⁵⁶ Mereka berpandangan bahwa pasar bebas akan membuat keuntungan yang sangat luar biasa dan dapat mensejahterakan rakyat dunia. Meski masih memiliki kekurangan, secara radikal keuntungannya lebih banyak dari kerugiannya. Namun pada kenyataannya, justru lebih banyak yang dirugikan ketimbang yang diuntungkan.

Integrasi ekonomi dunia dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan pribadi. Integrasi peraturan ekonomi diwujudkan melalui

⁵⁶ *Ibid*, Hal 63

lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan *World Bank*, memaksa negara-negara berkembang untuk mematuhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Pemudahan investor asing dan *Multi National Corporation* untuk masuk ke dalam negara berkembang, merupakan bagian dari strategi yang dikeluarkan melalui kebijakan yang dikamuflese sedemikian rupa sehingga tidak begitu ketahuan kedok sesungguhnya yang sebenarnya ingin mengeksploitasi. Neo-Liberalisme sesungguhnya sangatlah kejam. Melalui tangan-tangan tak terlihat (*Invisible Hand*), mereka masuk dan mengeruk apa yang dapat dijadikan keuntungan bagi mereka. Bagi India sendiri, pengaruh Neo-Liberalisme sudah terasa semenjak berakhirnya pemerintahan Nehru. Liberalisasi ekonomi mulai dipaksakan secara perlahan namun pasti. Monopoli dan proteksi pemerintah mulai dilonggarkan di beberapa sektor. Bahkan sekarang India sendiri telah menjadi negara yang memakai sistem ekonomi Semi-Liberal.

Mengapa Semi-Liberal, karena meskipun ada beberapa sektor yang diliberalisasikan karena memang adanya tuntutan dunia Internasional yang memang mau tidak mau memaksakan adanya kerjasama dengan pihak luar. India masih memberlakukan sistem proteksi terhadap sektor-sektornya yang dianggap penting. Pemerintah India menganggap bahwasanya, ada beberapa sektor penting yang harus dilindungi seperti misalnya pertanian dan Usaha Kecil Menengah agar tidak ditindas oleh perusahaan-perusahaan asing yang jelas lebih besar dari mereka. Inilah yang menjadi kekuatan India dalam menahan laju Neo-Liberalisme yang begitu kencang berlari menghantam

semua yang ada di depannya. India sangat protektif terhadap rakyatnya. India sangat melindungi petani dan Usaha Kecil Menengah. Pasar India juga masih tergolong susah untuk dimasuki. Selain itu juga, rakyat India lebih suka memakai produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari mulai makanan, pakaian, sampai dengan kendaraan, semuanya rata-rata produk dalam negeri. Boleh dikatakan hal ini didasarkan pada prinsip *Swadeshi* yang dibangun Gandhi sejak dulu. Diperkuat pula oleh sistem ekonomi repelita ala Nehru yang tidak mau mengimpor barang dari luar negeri.

Perpaduan ini menjadi unik karena, pada akhirnya menghasilkan sebuah sistem campuran dimana Liberalisme tidak sepenuhnya diberlakukan di India. Unsur-unsur sosialisme juga masih melekat di India. Ini dibuktikan oleh banyaknya subsidi yang diberikan oleh negara, dan juga proteksi pemerintah di berbagai sektor. Gandhi pernah mengungkapkan tentang sebuah konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang dibangun bukan saja dari sisi materialis, tapi juga spiritual dan moral. Mungkin konsep ini lah yang membangun India menjadi negara yang setengah Liberal dan setengah Sosialis.⁵⁷ Budaya yang dipopulerkan Gandhi, seperti non kekerasan, tolong-menolong sesama manusia, kesamaan hak dan kewajiban, anti eksploitasi, dan pemakaian produk sendiri, sudah melekat di dalam diri tiap-tiap Individu di India. Dan kesemuanya inilah yang menjadi fondasi utama India masa kini dalam menghadapi tantangan Era Global dan Neo-Liberalisme. Berikut

⁵⁷ Media Indonesia, Sabtu, 26 November 2005

beberapa pemikiran Mahatma Gandhi yang dijadikan sebagai landasan berpijak bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan juga landasan bagi masyarakat India dalam menyikapi era Globalisasi dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2

FALSAFAH GANDHI	BENTUK KEBIJAKAN	BENTUK PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
<i>Swadeshi</i> , adalah falsafah Gandhi yang merujuk pada kebanggaan memproduksi dan memakai produk dalam negeri	Salah satu kebijakan yang menggunakan <i>Swadeshi</i> adalah kebijakan proteksi terhadap Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu pemikiran Gandhi yang diterapkan dalam bentuk kebijakan. Demi menghindarkan pengusaha kecil dari persaingan tidak sehat dengan pengusaha asing, maka kebijakan ini dilakukan agar pengusaha lokal bisa terus membangun kreativitas tanpa ada pengeksploitasian dari perusahaan asing. Selain itu proteksi diberlakukan di sector penting lain seperti pendidikan, otomotif, pertanian dan farmasi.	Masyarakat India sendiri lebih senang menggunakan produk dalam negeri. Hal ini karena kesederhanaan Gandhi melekat di diri mereka. Kendaraan-kendaraan yang beredar di jalanan India juga buatan sendiri seperti Bajaj dan Ambassador. Pakaian mereka pun juga buatan sendiri, seperti kain khadi yang bahkan menjadikan tekstil India sangat ternama di India. Liberalisasi yang berlaku di sektor pendidikan juga demikian. Orang tua lebih memilih untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah lokal karena

		menganggap kualitasnya sama saja atau bahkan lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah Internasional.
<i>Satyagraha Ahimsa</i> , adalah falsafah turunan <i>Satyagraha</i> Gandhi yang merujuk pada perlawanan yang tidak dengan kekerasan atau <i>Nir-Violence</i>	kebijakan-kebijakan yang diambil dari falsafah <i>Ahimsa</i> salah satunya dapat kita lihat dari perlawanan India di dunia Internasional. India memang berteman dekat dengan Amerika Serikat dan beberapa kali dicap sebagai Neolib. Namun dibelakang itu, India justru melakukan perlawanan, salah satunya adalah dengan memperjuangkan hak-hak petani di G-20 dan G-33 serta membuat poros ekonomi baru melawan Eropa-AS bersama China, Brazil, dan Rusia.	Di dalam sebuah negara, demonstrasi adalah hal yang biasa. Namun cara rakyat India untuk menarik perhatian baik pemerintah maupun dunia Internasional tidak melalui cara kekerasan namun terkadang ekstrim. Dalam kasus bibit transgenik Monsanto misalnya, selain melakukan demonstrasi, para petani juga sering melakukan bunuh diri serta penolakan mentah-mentah terhadap Monsanto. Alhasil, pangeran Charles dari Inggris yang terkesima melihat perjuangan itu, mendirikan yayasan Bhumi Vaardan Foundation yang bertujuan untuk membantu petani disana. Selain itu kasus Monsanto juga masih diperjuangkan oleh kaum anti Neo-Liberal di India

<p><i>Satyagraha Sarvodaya</i>, adalah falsafah turunan <i>satyagraha</i> yang merujuk pada kesetaraan dan anti diskriminasi</p>	<p>Kebijakan penghilangan sistem kasta melalui program pemerintah <i>Positive Discrimination</i> yang bertujuan untuk mengkoreksi praktek diskriminasi dimasa lalu dan sekarang melalui tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak untuk memperoleh kesempatan di dalam pekerjaan dan pendidikan. Selain itu kebijakan untuk mengurangi diskriminasi terhadap minoritas muslim juga tidak terjadi lagi. Buktinya, dalam beberapa pemilu terakhir, presiden terpilih merupakan seorang muslim, yang terakhir adalah Pradibha Patil.</p>	<p>Persamaan dan kesetaraan merupakan salah satu tujuan utama Gandhi pada waktu itu untuk diwujudkan di India, sampai-sampai Gandhi meninggal ditembak oleh seorang hindu fanatik yang tidak terima dirinya memperjuangkan hak-hak orang muslim di India. Diskriminasi memang tidak mungkin hilang begitu saja, namun setidaknya kekerasan akibat diskriminasi baik kasta maupun agama di India sudah jauh berkurang dibandingkan dengan masa lalu.</p>
--	--	---

B. Perlawanan Petani Terhadap Monsanto

Gandhi pernah mengampanyekan perlawanan terhadap ketidak-adilan tuan tanah yang pro kolonial terhadap para petani pada masa penjajahan kolonial Inggris. Maka diberlakukanlah reformasi penghibahan tanah radikal. Gagasan Gandhi ini menjadi gerakan penghibahan tanah yang dipimpin oleh AV Bhave, yang mengimbau para tuan tanah agar mau menghibahkan sebagian tanahnya kepada para petani miskin. Sampai tahun 1957 gerakan ini berhasil mengumpulkan 50 juta are a tanah untuk dibagikan kepada petani. Gagasan ini juga berkembang menjadi gerakan penghibahan kekayaan dan penghibahan tenaga kerja. Sistem yang memberikan hak kepada para tuan tanah untuk memungut pajak dan memaksakan bagi hasil yang tidak adil, merupakan sisa feodalisme yang merupakan sumber eksploitasi dan harus dihapuskan.

Namun masuknya perusahaan benih Monsanto pada tahun 2002 dengan *Genetical Modified Organism* atau modifikasi organism secara genetisnya, berkolaborasi dengan perusahaan lokal India, BT Cotton (perusahaan kapas), membuat kekacauan baru di sektor pertanian India terutama kapas. Awal mula berdirinya Monsanto adalah ketika diberlakukannya perjanjian *Trade Related Aspects of Intelectuall Property Right* (TRIPs) yang diberlakukan oleh WTO yang mengakibatkan adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari berbagai pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan oleh individu maupun suatu perusahaan dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak

keaslian karya cipta yang menyangkut hak cipta, merek, paten, desain produk, dan rahasia dagang.⁵⁸ Dan dari kebijakan tersebut lah Monsanto memonopoli ilmu pengetahuan dan dapat mungkin untuk menguasai sumber daya alam dan teknologi sehingga mereka mampu untuk mengadvokasikan kedaulatan atas produk rekayasa genetika yang mereka buat sehingga merugikan petani di India.

Pemberlakuan hak paten bagi varietas-varietas ini sungguh tidaklah pantas, karena varietas-varietas tersebut telah dibudidayakan oleh petani selama berabad-abad. Hak paten yang dimiliki Monsanto ini, jelas membunuh hak petani di India, mereka dilarang membudidayakan benih yang telah berlabel tanpa ijin. Bila ternyata petani didapati menggunakannya walau tanpa sengaja, maka mereka akan mendapat sanksi dari Monsanto. Akibat daripada kekejaman yang dilakukan oleh Monsanto ini, banyak petani yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Demonstrasi petani di hampir seluruh penjuru India mulai merebak. Bahkan di negara bagian Andhra Pradesh sempat melarang bibit GM Monsanto ini beredar pada tahun 2005, namun tidak berhasil, dan sampai sekarang pemerintah provinsi ini melakukan tuntutan hukum terhadap Monsanto.

Pemerintah yang pada awalnya pro terhadap Monsanto, mulai tidak kuat menahan gempuran dari rakyatnya. Semakin tingginya tingkat bunuh diri petani akibat benih-benih transgenik ini, atau yang sering mereka sebut *GM*

⁵⁸ Parera, V. *WTO dan TRIPs*
<http://www.indonesia.com/poskup/2002/10/14/EDISI14/h04.htm> . Diakses tanggal 24 Desember 2011.

Genocide, sering dianggap sebagai pembunuhan massal secara perlahan-lahan oleh para pengamat HAM di dunia.⁵⁹ Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan dan pangan seperti Greenpeace telah menyatakan keikutsertaannya dalam memperjuangkan hak-hak petani India yang telah direbut oleh Monsanto. Melalui slogan-slogan macam “Quit India Now!” Greenpeace bersama aliansi petani dan buruh India menetapkan tanggal 9 agustus sebagai hari dimana perusahaan-perusahaan yang memonopoli pertanian dan pangan seperti Monsanto harus pergi.

Bahkan, akibat banyaknya perlawanan melalui cara bunuh diri, pangeran Charles yang terkesan dan prihatin atas fenomena ini, mendirikan sebuah yayasan bernama *Bhumi Vardaan Foundation* yang mengayomi serta membantu para petani di India.⁶⁰ Petani dan rakyat India tidak akan berhenti melakukan perlawanan yang *Ahimsa*, atau tanpa kekerasan seperti yang selalu dilakukan dan diserukan Gandhi di dalam kehidupannya sehari-hari, dengan harapan mendapat simpati masyarakat dunia sehingga dapat memaksa pemerintah India untuk mencari jalan mengeluarkan Monsanto dari India.

⁵⁹ Isabelle Delforge, *Dusta Industri Pangan: Menelusuri Jejak Monsanto (Nourrir Le Monde Ou L'Agrobusiness)*, Penerbit REaD Book, 2003, hal 167

⁶⁰ <http://www.greenpeace.org/india/en/Press/Monsanto-quit-India-day-observed-across-the-nation/>

C. Tarif Murah Untuk Rakyat

Keberpihakan pemerintah India dan negara bagian dapat kita lihat dari tarif-tarif dan subsidi-subsidi yang diberlakukan untuk rakyatnya. Seperti sarana umum, kebutuhan pokok, dan juga pendidikan. Dari sektor pendidikan misalnya. Pendidikan India boleh dikatakan tergolong murah namun berkualitas. Hal ini juga tidak lepas dari perdebatan antara pro liberalisasi dan pro proteksionisme. Beberapa kali terjadi perdebatan antara menteri keuangan dengan menteri pengembangan sumber daya manusia. Menteri keuangan beranggapan bahwa dengan masuknya liberalisasi pendidikan akan menambah pundi-pundi dollar di India serta mencapai pendidikan yang murah karena akan menimbulkan iklim yang kompetitif. Sementara kementerian pengembangan sumber daya manusia beranggapan bahwa, liberalisasi pendidikan hanya akan melunturkan semangat nasionalisme yang saat ini ada pada generasi-generasi di India.⁶¹

Disamping itu, liberalisasi pendidikan hanya merupakan bagian dari strategi WTO untuk lebih membuka pasar di India yang selama ini tergolong sulit untuk ditembus investasi asing. Meskipun saat ini di India telah diberlakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor pendidikan, bukan berarti India tunduk secara terus terang terhadap kebijakan WTO ini. Justru sebaliknya, institusi dan lembaga pendidikan justru akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya demi menjadi yang terbaik.

⁶¹ *Op-cit, Suhandi*, hal 178

Namun anehnya lagi, meskipun Liberalisasi di bidang pendidikan telah diberlakukan, lembaga pendidikan asing di India tidak sepopuler lembaga-lembaga lokalnya. Masyarakat beranggapan bahwa lembaga pendidikan asing memberikan harga yang mahal tapi tidak mampu nyai mutu yang setara dengan lembaga lokal di India. Disisi lain, sistem pendidikan sangat baik dan tidak eksklusif. Di India, memanggil seorang Amartya Sen yang memenangi berbagai penghargaan Nobel atau sekelas mantan presiden Abdul Karim untuk mengisi perkuliahan tidak perlu dengan prosedur yang rumit-rumit. Dan mereka memang dengan sukarela datang tanpa dibayar kapanpun mahasiswa membutuhkan mereka. Kesederhanaan dan kerendahan hati yang mereka tunjukkan patut dijadikan panutan oleh tenaga mengajar di negara-negara lain.

Disamping itu juga, harga buku-buku pelajaran dan uang sekolah di India tergolong murah dan tidak sedikit yang disubsidi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa India sangat serius dalam mempersiapkan generasinya kedepan. Dari sektor sarana umum, India juga memberlakukan tarif murah bagi rakyatnya. Contohnya dari sektor transportasi karena menjadi elemen penting di dalam aktivitas masyarakat. Transportasi umum seperti bus dan metro tergolong sangat murah. Untuk sarana umum metro misalnya, hanya dikenakan 6 Rupee sampai 22 Rupee. Harga yang sangat murah untuk ukuran transportasi umum.⁶² Tujuan dari tarif murah yang diterapkan pada sarana transportasi umum di India adalah untuk mengurangi kemacetan dan juga

⁶² *Ibid.* Hal 91-93

polusi. Untuk mengurangi polusi India juga memberlakukan wajib menggunakan Bahan Bakar Gas yang tentunya disubsidi sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan bensin.

D. Kesederhanaan Masyarakat India Tercermin dari Elitnya

Pejabat adalah orang yang dihormati dan disegani. Secara umum, seorang pejabat haruslah berpakaian rapi, memakai dasi, mengenakan aksesoris mewah, serta memakai kendaraan-kendaraan yang super mewah. Tapi kenyataan seperti itu justru terbalik jika melihat pejabat-pejabat tinggi di India. Kesan eksklusif yang selalu terbayang jika melihat seorang yang penting di suatu negara mungkin akan sirna jika melihat pejabat-pejabat di India. Mereka hanya mengenakan kemeja lusuh, dengan celana keper yang kusam dan sepatu buatan negeri sendiri. Kendaraan mereka juga hanya mobil-mobil butut buatan India Ambassador.

Perkantoran di India juga tidak semewah kantor-kantor pemerintahan di negara-negara lainnya. Gedung-gedungnya hanyalah gedung-gedung tua peninggalan Inggris. Isi gedung-gedung tersebut juga tidak mewah. Penampilan bersahaja seperti ini memang sudah menjadi ciri khas orang India yang lebih suka dan nyaman dengan gaya hidup sederhana. Di India para eksekutif ini hanya berharap dapat hidup dari gaji saja.

Jikapun ada korupsi, hanya sedikit. Boleh dibilang masyarakat India tidak terkena efek pamer Internasional. Mereka lebih memilih untuk memakai produk dalam negeri. Kesederhanaan para eksekutif dan pejabat India itu juga

tercermin dari belanja pegawai mereka yang murah. Bayangkan, gaji presiden hanya tak sampai 2 kali lipat pendapatan per-kapita penduduknya. Saat ini presiden India menerima sekitar US\$ 3.000 per tahun (setara dengan Rp.29.700.000).⁶³ Begitu juga dengan perdana menteri yang hanya menerima gaji setara dengan 2 kali lipat pendapatan per-kapita India, yaitu sekitar US\$ 4.106 per tahun (setara dengan Rp.37.300.000). Jumlah gaji pemimpin negara ini merupakan gaji presiden/perdana menteri termurah di dunia.⁶⁴

Sementara itu gaji pegawai parlemen tahun 2010 hanya berkisar 16.000 Rupee (setara dengan Rp.3.000.000), dan sekarang naik menjadi 50.000 (kira-kira setara dengan Rp.10.000.000). Sangat murah dibandingkan dengan gaji anggota parlemen negara-negara lain. Begitu juga dengan belanja pegawai negeri dan swasta mereka sangat murah.

Lagi-lagi hal ini membuktikan dedikasi mereka terhadap negara sangatlah besar. Masalah gaji tidak begitu diperdulikan oleh para pegawai-pegawai di India. Karena kesederhanaan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat India.

⁶³ Gaji parlemen, diakses tanggal 6 Mei 2011, dari <http://www.blurtit.com/q299540.html> diakses tanggal 16 Mei 2011

⁶⁴ Gaji Perdana Menteri India diakses tanggal 7 April 2011
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/23/160126-gaji-sby-30-kali-gaji-pm-india-12-kali-pm-cina>.

E. Kemajuan Industri Otomotif Berkat Kebijakan Proteksi

India, selain maju karena pengembangan ilmu IT dan Farmasi, juga karena semakin kompetitifnya industri otomotif. Industri otomotif bisa dibilang sedang mengalami fase bangkit. Di India sendiri warga lebih memilih untuk memakai kendaraan buatan India seperti mobil Ambassador yang banyak lalu lalang di perkotaan India seperti New Delhi dan Mumbai. Mobil-mobil ini juga dipakai kebanyakan pejabat. Selain itu, untuk angkutan umum juga dipakai kendaraan produk dalam negeri yaitu bajaj yang juga sering disebut rickshaw. Keduanya ini merupakan tonggak awal perkembangan industri otomotif India.

Pada dasarnya, Liberalisasi hampir saja menenggelamkan produk-produk dalam negeri otomotif India. Mobil-mobil Jepang dan Korea seperti Suzuki dan Hyundai kini memiliki saham yang besar di India. Namun lagi-lagi, berkat kerja keras dan kemauan memakai produk dalam negeri, industri otomotif lokal tak mau kalah dan segera berbenah. Hasilnya, industri otomotif seperti Tata Motors, Bajaj Auto dan Mahindra, tetap memegang kendali industri otomotif di India mengalahkan pesaing sekelas Toyota, Honda, Suzuki, Hyundai dan bahkan Ford dari Amerika.⁶⁵ Hal ini terutama didorong oleh kemampuan mereka mendesain serta merekayasa produk mereka sendiri. Selain itu, kualitas yang dipertunjukkan oleh industri otomotif India di dunia Internasional tidak kalah hebat dengan para pesaingnya seperti Jepang atau Cina terutama dalam hal sepeda motor. Jepang yang selama ini menjadi

⁶⁵ *Op-cit, Suhandana*, hal 85

eksportir terbesar sepeda motor di negara-negara kawasan Asia terutama, mendapat tantangan berat dari India. India mulai memasok sepeda motor mereka ke negara-negara berkembang di Asia dengan harga yang jauh lebih murah dibanding sepeda motor milik Jepang namun dengan kualitas yang sama. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat negara berkembang dan pengguna sepeda motor yang kebanyakan kalangan menengah kebawah. Sekali lagi ini menunjukkan India tidak profit oriented dan tidak mengambil keuntungan secara membabi buta dari penjualan sepeda motor mereka.

Namun di balik itu semua, keberhasilan industri otomotif India tidak bisa lepas dari perkembangan industri komponennya⁶⁶. Dan kemajuan industri komponen ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan proteksi yang saat ini diberlakukan pemerintah India. Salah satu kebijakan tersebut adalah, ketentuan yang mensyaratkan pihak asing untuk mencapai level 70 persen kandungan lokal selama 3 tahun, serta kewajiban pihak asing dalam memberikan pelatihan kepada mitra lokal di India. Kebijakan ini juga didorong oleh tenaga kerja yang murah dan terampil. Dan di India masa kini, industri komponen telah mampu untuk menyediakan berbagai kebutuhan komponen otomotif bagi pabrikan dalam negeri dan juga bahkan untuk ekspor. Dan disamping itu, dari semua perusahaan itu, ada sekitar 420

⁶⁶ *Ibid*, hal 89

perusahaan besar yang menjadi perusahaan kunci, serta didukung oleh sekitar 10.000 perusahaan kecil yang juga mempunyai peran penting di industri ini.⁶⁷

F. Kemajuan Pendidikan India

Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan utama dalam membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Masuknya Liberalisasi di berbagai bidang, juga membuat sektor pendidikan India merasakan dampaknya. Namun, liberalisasi tidak serta-merta diberikan keleluasaan begitu saja dalam memanipulasi di sektor ini. Beberapa kali terjadi perdebatan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia tentang Liberalisasi pendidikan melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). Menurut Kementerian Keuangan, dengan masuknya FDI di sektor pendidikan, akan membuat institusi pendidikan asing datang dan memberikan persaingan kualitas yang kompetitif dengan harga yang murah.

Memang pada tahun 2001, India telah memberlakukan FDI 100 persen. Namun regulasi pemerintah yang protektif, tetap menghasilkan respons yang tidak baik terhadap modal asing. Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya manusia. Bagaimanapun juga, masuknya Liberalisasi pendidikan hanyalah akal-akalan WTO untuk meraup keuntungan di India. Disisi lain, masyarakat India kurang tertarik dengan lembaga-lembaga asing ini. Masyarakat menganggap bahwa mutu institusi

⁶⁷ *Ibid*, hal 90-91

dan lembaga asing justru lebih rendah dibandingkan institusi-institusi lokal.⁶⁸ Jadi pemberlakuan proteksi dan regulasi ketat tetap dibutuhkan. Disamping perdebatan itu, India memang dikenal dengan pendidikannya yang murah dan bermutu.

Dari segi sarana dan fisik, bangunan-bangunannya memang tergolong tua dan kurang layak pakai. Sekolah Dasar, sampai dengan tingkat Universitas hanya memakai fasilitas sederhana yang mungkin tidak layak untuk belajar. Namun jangan tanya soal mutunya, lulusan-lulusan India banyak dipakai sebagai pakar, tenaga ahli, dan tenaga ajar di luar negeri.

Prinsip kesederhanaan yang bersahaja nampaknya masih dipegang teguh oleh kalangan siswa dan mahasiswa. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan soal fasilitas dan kemewahan sarana belajar. Bagi mereka, menghasilkan lulusan berkualitas jauh lebih penting ketimbang meributkan soal fasilitas pendukung. Namun India, dengan kesederhaannya mampu mencetak lulusan-lulusan berkualitas. Di kampus University New Delhi dan Jamia Millia Islamia misalnya, bangunan-bangunan tua digunakan untuk menuntut ilmu, ruang belajarnya hanya berukuran kira-kira 5x6 meter yang hanya dilengkapi dengan kursi-kursi kayu, meja belajar, papan tulis dengan kapur tulis-jangan bayangkan white board berspidol, serta satu unit kipas angin.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hal 179

⁶⁹ Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)*, Rineka Cipta, Jakarta Tn 1996

India juga berjuang untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi yaitu 39 persen dari lebih 1.2 Milliar penduduk. Salah satunya melalui perpustakaan buta huruf yaitu Perpustakaan Kerala. Kerala adalah Negara Bagian India yang masih tergolong miskin, namun dengan tingkat melek huruf tertinggi sejak 2001 yaitu 91 persen. Sebelum kemerdekaan, kegiatan untuk memberantas buta huruf sudah berlangsung di Negara Bagian ini.

Semua ini bermula dari perpustakaan desa yang dicanangkan oleh partai komunis India tahun (*Communist Party of India-Marxist*) 1945. Mereka menamakan gerakan ini sebagai *Grandhashala Sangham* atau pergerakan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi di pedesaan melalui program kursus membaca dua bulan di perpustakaan di desa-desa yang telah dimulai sejak tahun 1955.

Selain itu, perpustakaan juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas sastra, drama, sosial dan politik. Saat ini sudah ada sekitar 100 perpustakaan per-Kabupaten di Negara Bagian Kerala.⁷⁰ Fasilitasnya meliputi radio, televisi, pusat studi akademik, dan beberapa bagian khusus seperti, perpustakaan anak, perpustakaan keliling, informasi, perempuan, dan olahraga. Sementara perpustakaan terbesarnya State Central Library, memiliki koleksi 310.000 buku, 120 langganan majalah, 56 jurnal berbahasa Inggris, 56 jurnal berbahasa Malayam, 11 jurnal untuk anak dan banyak lagi.

⁷⁰ *Op-cit, Suhandu*, hal 184

G. Perlawanan Negara Berkembang di WTO

Gobalisasi yang selalu digembar-gemborkan dan dianggap mampu membawa kesejahteraan pada rakyat dunia, ternyata membuat ketimpangan antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya demonstrasi yang menentang berbagai pertemuan yang mencanangkan agenda Neo-Liberal di dalamnya.

“Battle of Seattle” yang menjadi gerakan pertama menentang Globalisasi dan Neo-Liberalnya menjadi icon pergerakan dalam mengakomodasi kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.⁷¹ Kala itu, gerakan “Battle of Seattle” menentang pertemuan para menteri keuangan di forum World Trade Organization (WTO). Setelah “Battle of Seattle”, masih banyak lagi gerakan yang lebih terorganisir menentang pertemuan-pertemuan yang membahas tentang ekonomi internasional. Semua pergerakan itu hanya sedikit dari banyak kelompok yang merasa dirugikan oleh Globalisasi dengan ekonomi Neo-Liberalnya.

Namun perlawanan tidak hanya terjadi dari luar forum-forum tersebut. India bersama dengan sejumlah negara berkembang lainnya juga melancarkan protes keras terhadap kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Di forum WTO misalnya, India adalah negara yang paling vokal dalam menyerukan keadilan. Latar belakangnya jelas. Di India, 58 persen penduduknya adalah petani yang menyumbangkan 22 persen

⁷¹ Bello, Walden., *De-Globalisasi (Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru)*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004, hal 2

Produksi Domestik Bruto (PDB).⁷² Selain itu, sebagian besar ekonomi India masih didominasi sektor manufaktur yang tentunya membutuhkan pasar ekspor ke negara-negara maju. Kebijakan WTO mengalihkan pasar ke negara-negara berkembang untuk investasi produk negara maju, justru membuat ketimpangan.

Pembukaan pasar negara berkembang terhadap investasi negara maju hanya akan menguntungkan negara maju. Disisi lain mereka akan mengeksploitasi dan menjajah ekonomi negara-negara berkembang. Hal ini menjadi keprihatinan India. India menganggap bahwasanya, kebijakan perdagangan internasional bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat global. Peningkatan standard hidup, jaminan pendapatan, pertumbuhan yang baik, serta kesempatan yang sama antara negara berkembang dengan negara maju, seharusnya merupakan tujuan utama dari perdagangan internasional. India juga memperjuangkan petaninya di WTO. Perlindungan terhadap petani adalah tugas yang mulia bagi India. India menganggap negara-negara maju terlalu memproteksi pertanian mereka. Padahal negara maju sendiri selalu saja masuk ke sektor pertanian n negara berkembang dan mengeksploitasinya.

Menteri Perdagangan dan Industri Inda Kamal Nath mengatakan bahwasanya proteksi pertanian negara maju telah menghambat negara berkembang untuk mengekspor ke negara maju. Hal ini diserukan di WTO agar terjadi keseimbangan dan juga untuk kepentingan pertanian yang menjadi

⁷² *Op-cit, Suhandu*, hal 16-17

andalan kehidupan petani di negara berkembang secara umum dan di terutama di India. Untuk itulah India harus peka terhadap perkembangan eksternal agar mampu mengontrol dan memperjuangkan petaninya. India juga membentuk aliansi negara berkembang melalui forum G-20 dan G-33 untuk membela kepentingan negara berkembang.

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan coba kembali mengulang sembari mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan dari tulisan-tulisan diatas. Globalisasi bersama dengan Neo-Liberalisme memang tidak akan pernah mampu untuk menempati janji-janjinya dalam menciptakan kesejahteraan di dunia. India sendiri masih dianggap sebagai salah satu negara berkembang yang pertumbuhannya dianggap lambat selama beberapa dekade belakangan ini. Sampai pada akhirnya meraih pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan pada tahun 2009. India yang mempunyai *track record* buruk karena masalah pertumbuhan ekonomi yang lamban, kelaparan massal, dan perang-perang sipil, mampu membalikkan keadaan dan menjadi salah satu pesaing kuat di era globalisasi ini.

Tetapi Negara berpenduduk lebih dari 1 Miliar jiwa ini bukanlah pemain egois yang ingin memenangi segala-galanya di dunia Internasional atau tidak *profit oriented*. India selalu menjual hasil produksinya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Internasional terutama negara berkembang. Bahkan India, bersama dengan Cina, selalu dianggap sebagai perusak pasar oleh kaum Neo-Liberal yang mayoritas adalah negara-negara maju di barat. Secara integral, India juga tidak serta-merta menerima investor secara mentah-mentah. Penyeleksian terhadap investor dilakukan secara ketat agar tidak merugikan rakyat.

Buah pemikiran Gandhi sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan India yang baru saja penulis uraikan diatas. Mulai dari tarif rendah yang diberlakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang pro kerakyatan, serta pengamalan falsafah-falsafah kesederhanaan merupakan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Gandhi sebagai pijakan dasar masyarakat India dalam bertindak. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang tidak hanya berpatokan pada materi namun menimbang aspek moral, spiritual, dan budaya didalamnya, sangat berpengaruh besar dan telah menjadi kebiasaan bagi seluruh rakyat di India. Falsafah seperti *Satyagraha* dan *Swadeshi* merupakan fondasi pijakan bagi para pengambil keputusan di India dalam mengeluarkan kebijakan. Gandhi sendiri selalu menjadikan manusia sebagai pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan.

Meskipun tidak tertulis secara terang-terangan dalam perundang-undangan di India, falsafah-falsafah yang terkandung dalam konsep *welfare state* yang digagas Gandhi telah melekat di hati masing-masing individu di India. Hidup ini memang selalu berputar, dan saat ini Neo-Liberalisme tengah merajai di seluruh antero dunia ini. Namun nilai-nilai kesederhanaan dan kebenaran seperti yang Gandhi kemukakan, akan selalu mampu untuk membuat perbedaan. Pemikiran-pemikiran Gandhi ini juga akan sangat bermanfaat bila dijadikan acuan oleh para pemimpin dunia sebagai refleksi dan referensi agar mampu menjadikan kehidupan ini lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alappatt, Francis, *Mahatma Gandhi (prinsip hidup, pemikiran politik, dan konsep ekonomi)*, Penerbit Nusamedia, Terj. S. Farida, 2005
- Delforge, Isabelle *Dusta Industri Pangan: Menelusuri Jejak Monsanto (Nourrir Le Monde Ou L'Agrobusiness)*, Penerbit REaD Book, 2003, hal 167
- Gandhi, M.K, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*, Penerbit Narasi, Terj. Andi Tenri W, 2009
- Gunawan, Ary H , *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)* , Rineka Cipta
- Nanang Pramuji Mugasejati dan Ucu Hartanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, 2006
- Robert Jackson & George Sorensen, *Introduction to International Relations* , Pustaka Pelajar, 2005
- S., Nuraeni, *Regionalisme Dalam Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 2010
- Suhanda, Irwan, *India Bangkitnya Raksasa Baru Asia (Calon Pemain di Era Globalisasi)*, Penerbit Kompas, 2007
- Sutedi, Adrian, S.H.,M.H., *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, 2009
- Walden, Bello, *De-Globalisasi (Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru)*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004
- Widyamarta A., *The International Forum On Globalization, Globalisasi, Kemiskinan, dan Ketimpangan* , Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2004

Media dan Internet

Analisis mengenai konsep welfare state, diakses pada tanggal 22 Mei 2011 dari
<http://map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>

Ekonomi India, diakses pada tanggal 20 April 2011, dari
<http://www.anneahira.com/ekonomi-india.htm>

Gaji parlemen, diakses tanggal 6 Mei 2011, dari
<http://www.blurtit.com/q299540.html> diakses tanggal 16 mei 2011

Gaji Perdana Menteri India diakses tanggal 7 April 2011
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/23/160126-gaji-sby-30-kali-gaji-pm-india-12-kali-pm-cina>.

Greenpeace, Monsanto Quit India
<http://www.greenpeace.org/india/en/Press/Monsanto-quit-India-day-observed-across-the-nation/>

Konsep welfare state, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 dari
<http://www.oberlin.edu/politics/howell/Politics%20317%20Syllabus%202004.pdf>

Mahatma Gandhi dari satyagraha menuju Negara kesejahteraan, diakses pada tanggal 10 Februari 2011 dari
<http://gazali.wordpress.com/2008/01/07/mahatma-gandhi-dari-satyagraha-menuju-negara-kesejahteraan/>

Media Indonesia, Sabtu, 26 November 2005, dibaca pada 13 April 2011

Negara Kesejahteraan, diakses pada tanggal 17 April 2011 dari
<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>

Parera, V. *WTO dan TRIPs*.
<http://www.indomedia.com/poskup/2002/10/14/EDISI14/h04.htm>.
Diakses tanggal 24 Desember 2011.

Pengertian negara sejahtera, diakses pada tanggal 3 Februari 2011 dari
<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2090873-pengertian-negara-sejahtera-welfare-state/#ixzz1JyEbid9V>

Sistem ekonomi Pasar Bebas, diakses pada tanggal 3 Februari 2011 dari,
<http://www.scribd.com/doc/35271773/Sistem-Ekonomi-Pasar-Bebas>

Upaya mewujudkan negara kesejahteraan, diakses pada tanggal 12 April 2011
dari <http://stihyusticia.blogspot.com/2011/03/upaya-mewujudkan-negara-kesejahteraan.html>

Visi ekonomi Mahatma Gandhi, diakses pada tanggal 27 Februari 2011
<http://averroespress.net/review-press/resensi-buku/259-visi-ekonomi-Mahatma-Gandhi.html>

LAMPIRAN

GEOGRAFIS NEGARA INDIA



India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu milyar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis dengan luas wilayah 3.287.590 km². Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan mempunyai kemampuan senjata nuklir.

India terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan.

Disebelah timur India berbatasan dengan Myanmar yang dibatasi oleh kaki Pegunungan Himalaya. Pada bagian ini India mengelilingi hampir seluruh bagian negara Bangladesh. Di sebelah barat India berbatasan dengan Pakistan dan laut barat. Di bagian utara, India berbatasan dengan Nepal, Rusia, dan China. Di sebelah selatan, negara ini berbatasan dengan Samudra Hindia.



Sungai-sungai penting di India antara lain sungai Gan gga yang bersumber dari pegunungan Himalaya dan merupakan sungai terpenting di India, sungai Brahmaputra yang mengalir dari timur laut India serta sungai Indus yang berasal dari Ladakh India. Himlaya merupakan himpunan dari beberapa pegunungan yang terdiri dari sejumlah lembah yang besar antara lain Lembah Hullu dan Lembah Kathmandu. Gunung tertinggi di India adalah gunung *Kanchenjunga* (8598 m) yang termasuk dalam gugusan pegunungan Himalaya.

Sungai Gangga merupakan sungai utama di India dan merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Berjuta-juta ummat Hindu, *Gangga Mai* atau sungai induk merupakan sungai suci. Airnya dianggap dapat membersihkan jiwa dari segala dosa dan menyembuhkan badan dari segala macam penyakit. Setiap tahun beribu-ribu ummat Hindu datang berziarah ke Sungai Gangga untuk mandi. Banyak Kuil Hindu berdiri di sepanjang pinggir Sungai Gangga, karena Gangga merupakan sungai penting di dalam upacara keagamaan Hindu. Disamping agama Hindu, dua agama besar India lainnya yaitu Budha dan Jainisme lahir dan dibesarkan di Gangga.

Sungai Indus merupakan salah satu sungai besar di Asia. Di sekitar dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Indus ini terdapat Kitab Suci *Weda* yaitu kitab suci umat Hindu. Sungai Indus dalam sejarahnya berarti penting bagi India, baik untuk alasan ekonomi maupun militer. Sungai Indus berguna sebagai penghalang terhadap penyerbuan asing, sedangkan airnya menyuburkan lahan di India barat laut dan yang sekarang adalah Pakistan. Lembah Indus merupakan daerah yang amat subur dengan menghasilkan gandum, jagung, padi dan aneka buah-buahan dan sayuran.

India adalah letak dari peradaban kuno seperti Budaya Lembah Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947.

Seluruh negara-negara bagian India di utara dan timur laut dibentuk oleh Banjaran Himalaya. Wilayah lainnya terdiri dari hamparan Indo-Gangetic yang subur. Di sebelah barat yang berbatasan dengan Pakistan tenggara terdapat Gurun *Thar*. Semenanjung India di selatan hampir seluruhnya merupakan bagian dari hamparan Dekan (*Deccan*). Di kedua sisi hamparan ini terdapat dua banjaran pesisir yang berbukit-bukit, Ghats Barat dan Ghats Timur. Cuaca India beragam, dari cuaca tropis di selatan hingga ke cuaca menengah di utara. Sebagian dari India yang terletak di pegunungan Himalaya mempunyai cuaca *tundra* (Tundra adalah suatu area dimana pertumbuhan pohon terhambat dengan Rendahnya, suhu lingkungan sekitar. Pada area ini, mayoritas tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut, rerumputan, dan pohon dari bangsa conifer). India memperoleh hujannya dari monsun.

Negara-Negara Bagian Dan Union Territory

India dibagi kepada 28 negara bagian (yang kemudian dibagi kepada distrik), enam Wilayah Persatuan (*Union Territory*) dan Wilayah Ibu Kota Nasional (*National Capital Territory*) Delhi. Negara-negara bagian mempunyai

pemerintah yang dilantik sendiri, sementara Wilayah-wilayah Persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan (*union government*), meski beberapa di antaranya mempunyai pemerintah yang dilantik.

SEJARAH SINGKAT NEGARA INDIA

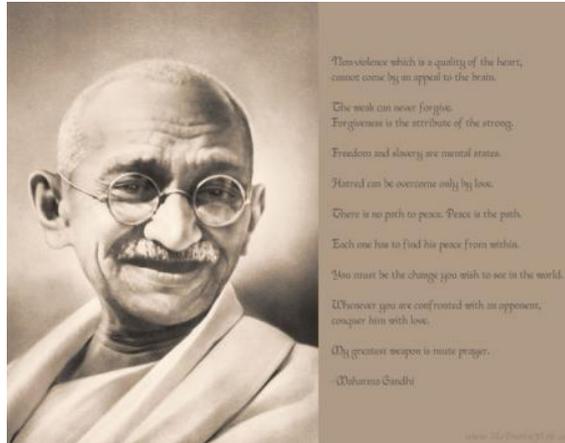
Sejarah India dimulai dari Peradaban Lembah Indus, yang menyebar di bagian barat laut subbenua India, dari tahun 3300 sampai 1700 SM. Peradaban Zaman Perunggu runtuh di pertengahan milenium kedua SM dan diikuti dengan Zaman Besi India. Pada abad ke-6 SM, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Sejarah India adalah sejarah panjang dan kompleks. Diantara tempat yang terpenting di dalam pra sejarah ini (sekitar tahun 2500-1500 SM) adalah di *Mohenjo Daro* di Sind dan *Harappa* di Punjab (keduanya wilayah Pakistan). Peradaban India yang pertama muncul bersamaan dengan peradaban Mesir zaman Firaun dan sama kayanya di bidang materi dan kecanggihannya.

Kerajaan India pertama yang besar (Kerajaan *Maurya*) muncul sekitar tahun 324 SM. Penguasa terbesar adalah Raja Asoka, yang memerintah dari sekitar tahun 274-232 SM. Asoka menjadi seorang Budha sehingga mengabdikan seluruh hidupnya demi tersebarnya Agama Budha di India dan Srilanka. Semasa kekuasaan Asokalah seni bangunan di India mulai menampakkan wujudnya. Nama "Asoka" berarti 'tanpa duka' dalam bahasa Sansekerta (*a* – tanpa, *soka* – duka). Asoka adalah pemimpin pertama Bharata (India) Kuna, setelah para pemimpin Mahabharata yang termasyhur, yang menyatukan wilayah yang sangat luas ini di bawah kekaisarannya, yang bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara India dewasa ini

Kerajaan besar berikutnya di India sekitar tahun 320-500 adalah kerajaan Gupta. Kerajaan ini dianggap sebagai zaman keemasan dan zaman klasik India kuno. Di bawah pemerintahan Gupta, kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, dan kekayaan harta benda mencapai puncak kebesarannya. Selama ini pula agama Hindu semakin berpengaruh sebagai agama sebagian besar penduduk India.

Zaman eropa dalam sejarah Asia dimulai ketika penjelajah laut bangsa Portugis

PROFIL MAHATMA GANDHI



Di setiap periode sejarah, bermunculan orang-orang yang kehadirannya membawa perubahan bagi arah sejarah dunia. Salah satunya adalah Gandhi. Dengan cara yang amat khas dan sederhana, tanpa dengan mengangkat senjata, Gandhi mampu mengubah arah sejarah India. Gandhi tidak menganggap bahwa dirinya adalah seorang filsuf atau mistikus. Meski demikian, tak ada keraguan sedikitpun bahwa dibalik tindakan-tindakannya terdapat sebuah pemikiran yang luas lagi mendalam. Garis besar pemikiran Gandhi sejatinya mengarah pada **Advaita** (nondualisme) **Vedanta**, sebuah perpaduan dengan rasa kekaguman yang mendalam dari etika-etika *Bhagavad Gita*. Dari dasar-dasar kepercayaan tersebut, Gandhi merumuskan sebuah etika, program politik atau ekonomi, yang menyentuh setiap aspek kehidupan.

Melalui paper sederhana ini, penulis hendak menampilkan kisah hidup, sistem pemikiran dan/atau ajaran-ajaran Gandhi yang mampu menggerakkan dan menginspirasi banyak orang. Paper ini didasarkan pada tulisan Diane Collinson dan Robert Wilkinson tentang Gandhi dalam buku *Thirty-Five Oriental Philosophers*. Rujukan dari sumber-sumber lain akan penulis gunakan sejauh memperkuat informasi dan argumen yang dikemukakan oleh kedua penulis tersebut.

Riwayat hidup

Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, ibu kota kerajaan Gujarat di bagian barat India. Ayahnya adalah seorang Perdana Menteri di Porbandar, sementara ibunya, Putlibai, membagi waktunya antara mengurus keluarga dengan melakukan ritual-ritual keagamaan. Gandhi tumbuh dalam suasana religius yang kental. Keluarganya merupakan penganut setia paham Waisnawa. Dalam atmosfer religius keluarganya inilah, Gandhi, sedari kecil,

mulai menghirup semangat **ahimsa** (nir-kekerasan) dan praktek berpuasa sebagai upaya pemurnian diri.

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan setempat, dimana ia tidak terlalu menonjol, dan melangsungkan pernikahan pada usia yang masih amat muda (13 tahun), keluarganya memutuskan bahwa ia harus menjadi seorang pengacara. Untuk menjadi seorang pengacara, Gandhi harus meneruskan pendidikannya di Inggris. Gandhi memulai perjalanannya ke Inggris pada akhir tahun 1888. Ia tinggal disana sampai tahun 1891.

Kembali ke India, Gandhi menyadari bahwa kecakapannya tidak cukup memberinya kesempatan untuk memperoleh kesuksesan karier. Sifatnya yang pemalu tidak membantunya untuk mendapat nilai lebih dari banyak orang yang berprofesi sama. Akhirnya, ia menerima tawaran dari Dada Abdulah, seorang pemilik kapal dan pedagang besar dari Natal, Afrika Selatan. Dia mengundang Gandhi untuk membantu perusahaannya menangani permasalahan hukum, dengan masa kontrak selama 1 tahun. Ia berangkat ke Afrika Selatan pada tahun 1893, dimana pengalaman-pengalaman selama disana akan mengubah tujuan hidupnya. Tekanan rasial terhadap orang-orang India di Afrika Selatan yang dilakukan oleh warga Eropa mengubah Gandhi menjadi seorang aktivis politik. Ternyata, tidak hanya selama setahun ia tinggal di Afrika Selatan, melainkan sampai 21 tahun (1914). Dalam kurun waktu itu, dengan tanpa lelah, ia menentang ketidakadilan hukum yang terjadi di sana, khususnya pelanggaran struktural terhadap hak-hak sipil komunitas India yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Ia mengembangkan teknik **Satyagraha** atau perlawanan tanpa kekerasan untuk menentang ketidakadilan hukum tersebut.

Meski demikian, selama perang Boer (1899-1902), dengan masih tetap berpegang pada prinsipnya, Gandhi menganjurkan agar orang-orang India menjalankan kewajibannya sebagai anggota koloni Natal. Ia lantas mengorganisir regu pertolongan (korps ambulans) yang terdiri dari ribuan sukarelawan orang India yang memberikan pelayanan selama peperangan berlangsung. Akhirnya, pada tahun 1914, setelah memenangkan serangkaian perjuangan yang melelahkan sekaligus mengagumkan untuk kemerdekaan hak sipil bagi orang India di Afrika Selatan, Gandhi memutuskan kembali ke India.

Pada tahun-tahun awal setelah kepindahannya dari Afrika Selatan, Gandhi mengambil bagian kecil dalam dunia politik India. Gandhi akhirnya tergerak untuk melakukan aksi politik pada tahun 1919, sebagai upaya perlawanan untuk mengusulkan perundang-undangan yang legal menurut pemerintahan Inggris bagi para terdakwa yang dipenjara tanpa melalui proses persidangan. Sejak saat itu sampai akhir hidupnya, Gandhi tidak pernah jauh dari perjuangan untuk kemerdekaan India. Gandhi menggunakan teknik *satyagraha* dalam beberapa kesempatan untuk membuat pengaruh yang besar. Ia mengubah Kongres Nasional India menjadi sebuah kekuatan politik yang besar.

Selain kemerdekaan India, impian Gandhi yang terbesar adalah persatuan antara kaum Hindu dan Muslim. Tapi, kenyataan ternyata berkata lain. Pada tanggal 15 Agustus 1947, India memang mendapat kemerdekaan dari Inggris, namun kemerdekaan tersebut dibarengi dengan pendeklarasian negara Pakistan oleh kaum Muslim, yang memisahkan diri dari kaum Hindu di India. Kenyataan tersebut dengan segera membuyarkan impian Gandhi. Akhirnya, yang bisa ia lakukan hanya melakukan rekonsiliasi atas kekerasan dan kerusuhan yang menyertai pemisahan antarkedua komunitas religius tersebut. Usaha rekonsiliasinya menuai kesuksesan. Tapi, disamping itu, usaha tersebut juga menimbulkan kecurigaan diantara kedua belah pihak yang bermusuhan. Bagi orang-orang Hindu, Gandhi dicurigai karena ia dianggap sebagai kawan kaum muslim, sedangkan bagi kaum Muslim, ia dicurigai karena dia sendiri beragama Hindu. Itulah sebabnya seorang Hindu fundamentalis, yang bernama Nathuram Godse, menembaknya hingga mati pada tanggal 30 Januari 1948 di Delhi.

